

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 4 TAHUN 2019, SERI E**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 5 (lima) tahunan secara mandiri yang sistematis selaras dengan Pedoman Penyusunan Rencana aksi;
- b. bahwa TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang perlu didukung oleh daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimana tujuan, target dan indikatornya perlu disesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60 Seri D.9);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri, D.11);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 76, Seri E.70).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang akan dicapai tahun 2016 sampai tahun 2030;
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;



3. Rencana Aksi Nasional TPB, yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;
4. Rencana Aksi Daerah TPB, yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
5. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
6. Bupati adalah Bupati Cirebon;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten;
10. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB;
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB;
12. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
13. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan;
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
16. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran/ pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;



18. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
24. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB dan RAD TPB yang telah selesai.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Penyusunan RAD TPB;
- b. Penetapan RAD;
- c. Keterkaitan RAD TPB Dengan Dokumen Perencanaan;
- d. Prinsip Pelaksanaan dan Peran Para Pihak Dalam Pelaksanaan RAD TPB;
- e. Pembiayaan/Pendanaan;
- f. Pelaksanaan RAD TPB Tahun 2019-2024;
- g. Pemantauan dan evaluasi;
- h. Penutup.

#### **Pasal 3**

- (1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- (2) TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan 319 indikator yaitu :
- a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;
  - b. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;
  - c. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
  - d. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas;
  - e. Tujuan 5 Kesetaraan Gender;
  - f. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
  - g. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau;
  - h. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
  - i. tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
  - j. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
  - k. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
  - l. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
  - m. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim;
  - n. Tujuan 14 Ekosistem Lautan;
  - o. Tujuan 15 Ekosistem Daratan;
  - p. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
  - q. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon bertujuan untuk:
- a. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB;
  - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran prioritas kabupaten dalam Peta Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat;
  - c. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan
  - d. menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung dan melaksanakan target, tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Dalam penyusunan RAD TPB Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten yang meliputi 10 tujuan dan 177 indikator dan ketersediaan data yang ada yaitu:
- a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;
  - b. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;
  - c. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
  - d. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas;
  - e. Tujuan 5 Kesetaraan Gender;
  - f. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
  - g. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
  - h. Sebagian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
  - i. Sebagian Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
  - j. Sebagian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

### **BAB III PENETAPAN RAD TPB**

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Sistematika RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan TPB Terhadap RPJMD
- 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.5. Pembiayaan TPB
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB
- 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.8. Mengurangi Kesenjangan
- 2.9. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.10 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- 3.7 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
- 3.8 Sebagian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
- 3.9 Sebagian Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 3.10 Sebagian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
- Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

- (4) RAD TPB kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan melibatkan akademisi, organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan pelaku usaha.

#### **Pasal 6**

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam :

- a. Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam Pencapaian TPB/SDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya.
- c. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETERKAITAN RAD TPB DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) TPB merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- (2) TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengarusutamaan pencapaian TPB dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

#### **Pasal 8**

- (1) Dokumen RAD TPB ini perlu ditindaklanjuti dan diakomodir ke dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra), Renja dan RKA, DPA bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon terutama terkait program, kegiatan dan indikator yang terukur.
- (2) Dokumen RAD TPB ini perlu ditindaklanjuti dan diakomodir ke dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perusahaan/dunia usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (3) Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini perlu ditindaklanjuti dan diakomodir ke dalam dokumen perencanaan bagi akademisi, filantropi dan organisasi kemasyarakatan.



## **BAB V**

### **PRINSIP PELAKSANAAN DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN RAD TPB**

#### **Pasal 9**

Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs yaitu :

- a. bersifat universal;
- b. bersifat inklusif;
- c. terintegrasi antar dimensi;
- d. *no one left behind* (tidak ada seorangpun yang tertinggal).

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah daerah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian RAD TPB.
- (2) Organisasi kemasyarakatan berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.
- (3) Media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan publikasi tentang TPB, menginformasikan program dan pelaksanaan TPB.
- (4) Pelaku usaha dan filantropi berperan memfasilitasi dan melaksanakan program TPB, meningkatkan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
- (5) Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pencapaian TPB.

## **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan TPB, meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
  - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
  - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian TPB sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD TPB**

**Pasal 12**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD TPB merupakan kegiatan pengumpulan informasi di SKPD, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, akademisi yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan RAD TPB di SKPD, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.

**Pasal 13**

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD TPB bertujuan untuk memastikan apakah capaian RAD TPB di SKPD, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**Pasal 14**

- (1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.
- (3) Bupati menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati dan / atau Ketua Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.



**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Februari 2019

**Pj. BUPATI CIREBON,**

TTD

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E

Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Keselarasan TPB/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap RPJMD**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu

- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400







### 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB/SDGs jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal”. Sebagai contoh target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi:

- 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari,
- 2) akses pendidikan dasar,
- 3) kesetaraan gender dalam pendidikan,
- 4) Angka Kematian Bayi dan Balita,
- 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria,
- 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan
- 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu:

- 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional,
- 2) Angka Kematian Ibu,
- 3) prevalensi HIV dan AIDS,
- 4) tutupan lahan,
- 5) air minum layak perdesaan, dan
- 6) sanitasi layak perdesaan.

Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

### 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di



kancah dunia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular* sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Peraturan Presiden disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Kementerian PPN/BAPPENAS juga telah membuat regulasi pelaksanaannya dengan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi juga berkomitmen mendukung pencapaian TPB/SDGs dengan intensnya melakukan rapat pembahasan dengan SKPD provinsi dan Bappeda kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan yang lain untuk menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda juga berkomitmen mendukung pencapaian TPB/SDGs dengan melakukan kajian akademis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah menetapkan keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.137-Bappelitbangda/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda dan dibantu dengan INFID intens melakukan rapat pembahasan dengan SKPD teknis serta para pemangku kepentingan yang lain seperti Aisyiyah, Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis; Forum Warga Buruh Migran untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

#### **1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs**

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya



dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Nonpemerintah.

### **1.5. Pembiayaan SDGs**

Sebagai negara yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*).

Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi Penerimaan Negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (grant), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17



untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (means of implementation). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah (lower-middle income country), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya "ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility" yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd financing, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta, Filantropi). Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs.

### **1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs**

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu duabelas bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs harus ditetapkan. Perpres dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting.

Dengan koordinasi Bappelitbangda, setiap tahap penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh SKPD yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
2. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang



berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah. Dalam proses penyusunan matriks nonpemerintah, beberapa diskusi intensif dan rapat antara BAPPELITBANGDA, selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs, dengan pihak-pihak nonpemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan nonpemerintah yang sesuai untuk pencapaian suatu indikator.

3. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (baseline) secara runtun waktu (series) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data.
4. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (online) lewat laman (website) dan surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

### **1.7. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs**

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs kabupaten Cirebon terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

#### **1. BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMD**

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB terhadap RPJMD.

##### **1.2. SDGs Menyempurnakan MDGs**

Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang MDGs dan capaiannya, serta menunjukkan bahwa TPB/SDGs menyempurnakan MDGs secara lebih luas, terintegrasi, komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

##### **1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs**

Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

##### **1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan no one left behind, serta mencakup sarana pelaksanaan.

##### **1.5. Pembiayaan TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### **1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

##### **1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

#### **2. BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs**

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten yang dituliskan secara terkonsolidasi.



### 3. BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (tabel 2 format matriks bagian 1)

### BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

#### 1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

#### 2) Mekanisme Pelaporan

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

#### 3) Waktu pelaksanaan.

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

### BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Universal: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang
2. Integration: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. No-One Left Behind: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan. Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (trust building); kemitraan yang setara; partisipasi; akuntabel; dan saling menguntungkan.

### 6. LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

#### 1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

#### 2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

## BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

### 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada tahun 2017 (BPS, angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 31,02 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 27,7 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 600 ribu jiwa/tahun.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,84%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,03% terjadi pada tahun 2015. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2015-2016.

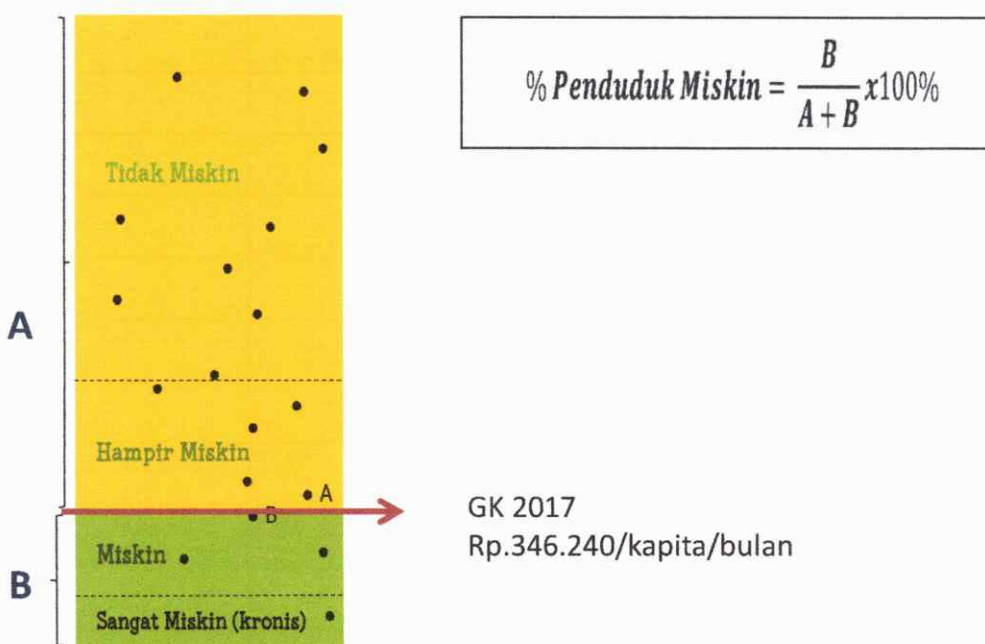
#### Garis Kemiskinan

Penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan dan dinyatakan dalam rupiah per bulan per kapita.

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum

Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai **kelompok acuan**.

**Definisi Operasional Garis Kemiskinan** adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya





- ✓ Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (warna hijau pada gambar).
- ✓ Penduduk miskin Kabupaten Cirebon adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 346.240,00 (kondisi 2017).
- ✓ Data jumlah penduduk miskin ini didapatkan dari pendataan **Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas)** yang dilakukan BPS setiap tahun. Karena data yang dikumpulkan merupakan **data sampel**, angka yang didapatkan dari pendataan ini merupakan **hasil estimasi**.

No	Kab/Kota	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jml Penddk miskin (jiwa)	%	Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln)	Jml Penddk miskin (jiwa)	%	Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln)	Jml Penddk miskin (jiwa)	%	Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln)
1	Kota Cirebon	31.740	10,36	358.654	30.150	9,73	373.866	30.190	9,66	392.725
2	Kab Cirebon	313.210	14,77	327.032	288.490	13,49	333.758	279.550	12,97	346.240
3	Indramayu	253.120	14,98	379.088	237.000	13,95	397.196	233.380	13,67	413.857
4	Majalengka	167.500	14,19	379.354	152.500	12,85	393.071	150.260	12,60	409.559
5	Kuningan	147.210	13,97	276.154	144.070	13,59	289.901	141.550	13,27	302.061

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

#### Indeks Kedalaman Kemiskinan

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kab. Kuningan</b>	1,91	1,91	2,20	2,32	2,20	2,00
<b>Kab. Cirebon</b>	2,15	2,15	2,22	2,42	2,21	2,13
<b>Kab. Majalengka</b>	2,51	2,52	1,98	2,34	2,06	1,93
<b>Kab. Indramayu</b>	2,12	2,12	1,96	2,37	1,69	2,34
<b>Kota. Cirebon</b>	1,65	1,65	1,07	1,28	1,86	1,56
<b>Jawa Barat</b>	1,62	1,62	1,39	1,63	1,49	1,45



Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin

#### Indeks Keparahan Kemiskinan

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kuningan	0,47	0,48	0,53	0,62	0,59	0,44
Kab. Cirebon	0,51	0,51	0,56	0,57	0,5	0,5
Kab. Majalengka	0,69	0,69	0,48	0,6	0,52	0,45
Kab. Indramayu	0,44	0,44	0,44	0,62	0,37	0,66
Kota. Cirebon	0,38	0,38	0,18	0,26	0,49	0,43
Jawa Barat	0,42	0,42	0,33	0,43	0,37	0,37

REKAP RUMAH TANGGA YANG TERMASUK DALAM DESIL 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin) Desil 3 (Hampir Miskin) S.D DESIL 4+ (Rentan Miskin)

#### BASIS DATA TERPADU (BDT) 2017 KABUPATEN CIREBON

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	Jumlah
1	GEBANG	3367	2555	1661	352	358	8,293
2	WALED	3187	2653	2031	515	779	9,165
3	GREGED	3170	2190	1165	250	292	7,067
4	BABAKAN	3095	3269	2347	380	299	9,390
5	MUNDU	2854	3448	2725	719	998	10,744
6	WERU	2583	2783	2252	727	931	9,276
7	LOSARI	2512	3170	2513	740	919	9,854
8	DUKUPUNTANG	2450	3794	3168	835	1165	11,412
9	PABEDILAN	2309	3344	2558	601	509	9,321
10	GEGESIK	2308	3915	3818	1086	1186	12,313
11	SUMBER	2225	2672	2388	803	1485	9,573
12	KLANGENAN	2207	2419	1850	460	614	7,550
13	KAPETAKAN	1946	1678	1004	187	162	4,977
14	TALUN	1867	2112	1744	603	873	7,199
15	DEPOK	1783	2689	2264	620	953	8,309
16	ASTANAJAPURA	1780	1800	1422	465	854	6,321
17	BEBER	1760	1536	1083	356	460	5,195
18	ARJAWINANGUN	1693	2363	1945	581	767	7,349
19	PLUMBON	1687	3021	3258	1141	2287	11,394
20	SUSUKAN	1654	2730	2570	749	563	8,266
21	PALIMANAN	1653	2213	1892	653	1067	7,478
22	PANGENAN	1589	1455	945	175	143	4,307
23	PANGURAGAN	1580	2139	1608	436	306	6,069
24	SEDONG	1573	2025	1481	342	244	5,665
25	GEMPOL	1531	1806	1542	461	808	6,148
26	LEMAHABANG	1518	1808	1367	477	780	5,950
27	CILEDUG	1489	2098	1893	544	945	6,969
28	PLERED	1472	1356	1098	329	502	4,757
29	SURANENGGALA	1437	1740	1361	358	371	5,267
30	JAMBLANG	1430	1360	1091	221	345	4,447
31	KARANGSEMBUNG	1396	2075	1771	514	569	6,325



32	KARANGWARENG	1380	1874	1424	357	367	5,402
33	KALIWEDI	1312	2009	1872	526	652	6,371
34	PABUARAN	1218	1613	1367	365	402	4,965
35	PASALEMAN	1194	1685	1352	313	249	4,793
36	SUSUKAN LEBAK	1046	1416	1060	308	423	4,253
37	TENGAHTANI	901	798	595	165	288	2,747
38	KEDAWUNG	827	1354	1417	597	1416	5,611
39	GUNUNGJATI	688	823	720	211	488	2,930
40	CIWARINGIN	674	1108	1104	312	499	3,697
JUMLAH		72,345	86,896	70,726	19,834	27,318	277,119

sumber : TNP2K

Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Secara umum, selama periode Maret 2016 terhadap Maret 2017, rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah 9,54%. Pertumbuhan konsumsi antarkelompok pengeluaran bervariasi yang diindikasikan dengan kelompok 10% teratas mengalami pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 6,92%. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada 20% kelompok pengeluaran terbawah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok 20% terbawah mengalami peningkatan.

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan nasional. Selama tiga periode publikasi angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi secara umum. Bahkan pada periode September 2016 terhadap Maret 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi kelompok 10% terbawah lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan garis kemiskinan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan Desember 2017, jumlah peserta JKN adalah 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa (49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI



JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 20,3 juta jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar 15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah yaitu sekitar 21,68% dari seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah. Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Pada aspek aksesibilitas persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan, meningkat dari 79,82% pada tahun 2010 menjadi 74,89% pada tahun 2017. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB cenderung menurun, yaitu sebesar 69,94% pada tahun 2010 menjadi 59,7% pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia pada aspek pemenuhan hak reproduksi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk, disamping adanya kesenjangan pencapaian aksesibilitas kesehatan antarwilayah.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layak meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 46,26%. Disisi lain, akses terhadap sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 35,06% pada tahun 2010 menjadi sebesar 53,81% pada tahun 2017. Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan yang memadai menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antarprovinsi dan antarwilayah perkotaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan yang layak antarwilayah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan penerangan yang bersumber dari listrik PLN juga mengalami peningkatan menjadi 94,52% pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 90,23% pada tahun 2010.

Akses Pelayanan Pendidikan, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Namun, pendidikan dasar setingkat SD/MI/Sederajat APM hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 2,80%, atau meningkat menjadi 97,21% pada tahun 2017 dari sebelumnya 94,41% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Peningkatan APM cukup signifikan terlihat pada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs/Sederajat yaitu sebesar 13,04% dari sebelumnya 63,51% pada tahun 2010 yang meningkat menjadi 76,55% pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi juga pada jenjang pendidikan menengah atas



yaitu SMA/SMK/MA/ sederajat yang ditunjukkan dengan APM pada tahun 2010 adalah 32,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 52,21%.

Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni pada RPJMD Kab Cirebon 2014-2019

Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2015			% Capaian Kinerja 2016			% Capaian Kinerja RPJMD	
		Target 2015	Realisasi 2015	% Capaian Kinerja 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja 2016	Target akhir RPJMD	% Capaian Kinerja RPJMD
- APM SD/MI	%	99.92	99.98	100.06	99.93	96.47	96.54	99.96	96.51
- APM SMP/MTs	%	89.7	78.97	88.04	89.9	78.05	86.82	90.5	86.24
- APM SMA/MA	%	60.84	85.31	140.22	61.32	37.39	60.98	62.76	59.58
- APM SMK	%	46.95	59.88	127.54	47.45	71.41	150.50	48.95	145.88

Masalah yang masih dihadapi Indonesia terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antarwilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

## 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun 2011-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, proporsi tersebut adalah sebesar 19,54% dan terus menurun menjadi sebesar 12,69% pada tahun 2016 (Susenas). Pola yang sama terjadi pada seluruh kelompok pendapatan. Pada kelompok penduduk termiskin (kuintil 1), proporsi penduduk rawan pangan pada tahun 2011 adalah sebesar 37,3%, kemudian meningkat menjadi 41,8% (2012), dan selanjutnya menurun hingga menjadi 32,8% (2016). Selain itu, masih ditemukan penduduk dengan konsumsi kalori perkapita per hari <1400 kkal pada kelompok pendapatan tertinggi (kuintil 5).

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Berdasarkan pendekatan angka kecukupan gizi sebesar 2.200 kkal/kap/hari, maka diketahui tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon digolongkan dalam tiga kelompok yakni tahan pangan, pangan rawan dan sangat rawan pangan. Perkembangan tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon sebagaimana tabel berikut.

Tabel Angka Kerawanan Pangan Kabupaten Cirebon

No.	Tahun	< 70% AKG	70% - 89,9% AKG	> 90% AKG
1	2013	13,15	35,00	51,85
2	2014	9,59	27,74	62,67
3	2015	11,37	21,55	67,08
4	2016	13,23	23,07	63,70

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon dalam Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, 2016

Keterangan : AKG : Angka Kecukupan Gizi (2.200 kkal/kap/hari)

< 70% AKG : Sangat Rawan Pangan

70% - 89,9% AKG : Rawan Pangan

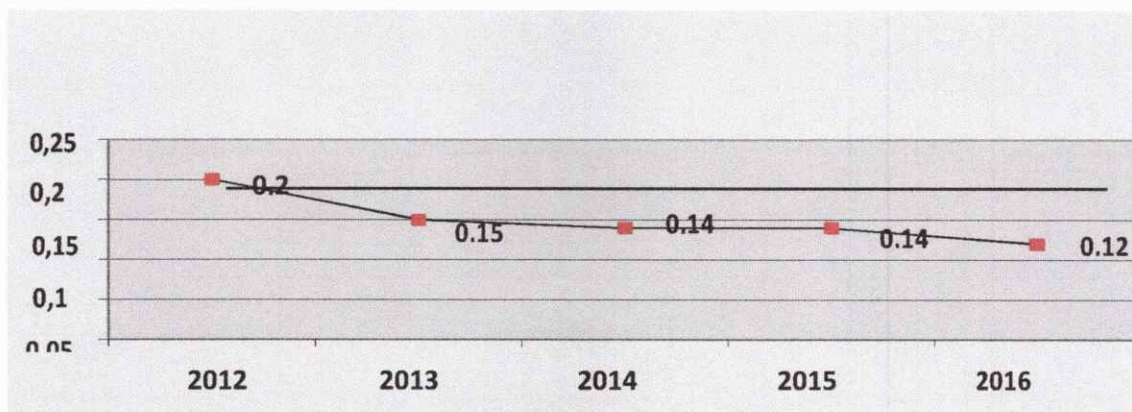
> 90% AKG : Tahan Pangan



Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2010-2016. Pada tahun 2016 proporsi stunting pada anak balita adalah sebesar 33,6% (Sirkesnas) menurun dari angka 35,6% (Riskesdas, 2010). Sementara pada anak baduta, proporsi stunting adalah sebesar 26,1% (Sirkesnas, 2016) menurun dari 32,9% (Riskesdas, 2013). Sementara itu, prevalensi balita kurus menurun cukup signifikan dari 13,3% (Riskesdas, 2010) menjadi 9,8% (Sirkesnas, 2016).

Pengukuran status Gizi dilakukan pada saat Bulan Penimbangan Balita serentak pada bulan Agustus. Untuk menilai status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) Kabupaten Cirebon tahun 2016 berdasarkan indikator BB/ TB (berat badan /tinggi badan) memberikan gambaran balita kurus sekali sebanyak 225 (0,12 %), balita kurus sebanyak 8551 (4,66 %), balita normal sebanyak 168.450 (91,73 %) dan balita gemuk sebanyak 6.403 (3,49 %). Sebagai pembandingan kondisi tahun 2015 yang mencapai 246 (0,14 %), balita kurus sebanyak 7.472 (4,14 % orang), balita normal sebanyak 167.012(92,57%) dan balita gemuk sebanyak 5.710(3,17%). Berikut adalah trend status gizi kurus sekali berdasarkan penghitungan berat badan dibagi tinggi badan pada balita di Kabupaten Cirebon.

Grafik Jumlah Balita dengan Status Gizi Kurus Sekali Berdasarkan Standar BB/TB di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 - 2016



Sumber :Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2016 Ket :BB/TB =Berat Badan per Tinggi Badan

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan pada tahun 2013 Prevalensi status Gizi pada anak usia 5 – 12 tahun di Kabupaten Cirebon yaitu kategori sangat pendek 12,5 %, Pendek 14,5 % dan normal 73 %. Prevalensi status gizi pada anak remaja (1315 tahun), kategori sangat pendek 19,4 %, pendek 28,2 % dan normal 52,4 %.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif.

Status gizi pada ibu hamil sangat penting karena berhubungan secara tidak langsung dengan indikator kesehatan. Status gizi pada ibu hamil antara lain dilihat dari kadar Hemoglobin dan pengukuran lingkaran atas untuk melihat apakah ibu hamil termasuk kategori KEK (Kurang Energi Kronik) atau bukan. Standar kadar Hemoglobinyang harus dicapai oleh ibu hamil adalah > 11 gr % jika kurang dari angka tersebut ibu hamil dinyatakan dalam kondisi anemia, sedangkan



standar lingkaran lengannya sekurang-kurangnya 23,5 cm. Tahun 2016, menurut pelaporan puskesmas, Jumlah ibu hamil dengan Lingkaran Lengan (LILA) kurang dari 23,5 cm sebanyak 4.829 (8,99 %) mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 3.774 (7,0%) dan tahun 2014 mencapai 3.229 (5,9%). Pada pemeriksaan kadar Haemoglobin tahun 2016 jumlah ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11 gr % sebanyak 5.994 (11,16 %) mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 5.691 (10,56 %), tahun 2014 mencapai 4.828 (8,95 %). Menurut hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi KEK pada ibu hamil di Kabupaten Cirebon 6,7 %.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan). Pada tahun 2013, 11,8% anak balita mengalami obesitas. Hal yang sama terjadi pada penduduk dewasa (usia lebih dari 18 tahun). Prevalensi obesitas pada kelompok ini meningkat dari 11,7% (Riskesdas, 2010) menjadi 15,4% (Riskesdas, 2013), dan meningkat kembali menjadi 20,7% (Sirkesnas, 2016). Dengan memperhatikan masalah gizi, saat ini Indonesia menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH (Desirable Dietary Pattern). Skor PPH ideal adalah 100 yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Selama periode 2009-2016 kualitas konsumsi pangan masyarakat berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 82,9% dan pada tahun 2016 skor PPH mencapai 86,0% (Badan Ketahanan Pangan). Pengetahuan pangan dan gizi masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang (B2SA) masih rendah. Hal inilah yang mempengaruhi pola permintaan pangan rumah tangga yang belum berkualitas.

Mengandalkan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Pada periode 2010-2016, produksi padi meningkat rata-rata per tahun sekitar 2,99% dan jagung 4,27%, sementara produksi kedelai cenderung menurun. Untuk bawang merah dan cabai (cabai besar dan cabai merah) rata-rata pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 5,82% per tahun dan 8,81% per tahun.

Produksi sumber protein hewani asal ternak yaitu daging sapi, daging ayam, dan daging lainnya rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 4,27% dan telur (ayam ras, ayam kampung, itik/bebek, dan puyuh) sebesar 6,35%. Produksi sumber protein hewani asal ikan pertumbuhannya meningkat pesat, yaitu untuk perikanan tangkap rata-rata per tahun sebesar 4,06% dan perikanan budidaya sekitar 18,30% (Pusat Data dan Statistik Pertanian, Kementan; dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP).

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (aging farmer) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi,



informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (food losses and waste) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, pemerintah melepas varietas unggul tanaman pangan yang sesuai dengan agroekosistem dan mampu merespon perubahan lingkungan. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia mulai mengembangkan berbagai varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan bekerja sama dengan lembaga penelitian internasional. Sampai dengan tahun 2015, telah dilepas lebih dari 400 VUB padi inbrida hasil pemuliaan para peneliti (pemulia atau breeder) Indonesia dan 100 VUB padi hibrida yang dihasilkan peneliti Indonesia dan yang diintroduksi oleh perusahaan multinasional. Selama periode 2010-2016, pemerintah telah melepas 60 VUB padi, 31 VUB jagung, dan 11 VUB kedelai hasil para peneliti nasional (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Balitbangtan). Untuk tanaman padi, VUB dirancang untuk dimanfaatkan pada berbagai agroekosistem, yaitu 35 varietas di lahan irigasi, 10 varietas di lahan tadah hujan/kering, dan 6 varietas di lahan rawa. Untuk tanaman jagung, dari 31 VUB sebanyak 9 varietas berupa jenis VUB hibrida.

Untuk proporsi hewan ternak dan sejenisnya yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, sejak 1998 Balitbangtan telah melakukan eksplorasi sumber daya genetik hewan ternak lokal rumpun ayam, itik, dan domba. Berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi karakterisasi sifat-sifat produksi ternak, selanjutnya dilakukan serangkaian proses seleksi untuk mendapatkan rumpun atau galur ternak yang menghasilkan bibit unggul. Melalui proses pemuliaan ternak ini, pada tahun 2014-2016 telah dilepas satu bibit unggul ayam lokal petelur, satu bibit unggul ayam pedaging, dua itik unggul, dan satu ternak domba komposit Sumatera (komposisi genetik 50% domba lokal, 25% St. Croix, 25 Barbados Blackbelly).

### **2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu upaya kunci yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Menurut SDKI, persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dari 46% (2007) menjadi 63,2% (2012). Selanjutnya, data Susenas menunjukkan peningkatan menjadi 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI juga meningkat dari 73% (2007) menjadi 83% (2012). Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), yang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (Annual Reduction Rate/ARR). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB/SDGs AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Angka kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100 ribu kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada kurun waktutertentu. Seperti Angka Kematian Bayi dan Balita, Angka kematian Ibu tidak dapat dihasilkan rutin setiap tahun dari pelaporan Fasilitas Kesehatan, tetapi merupakan



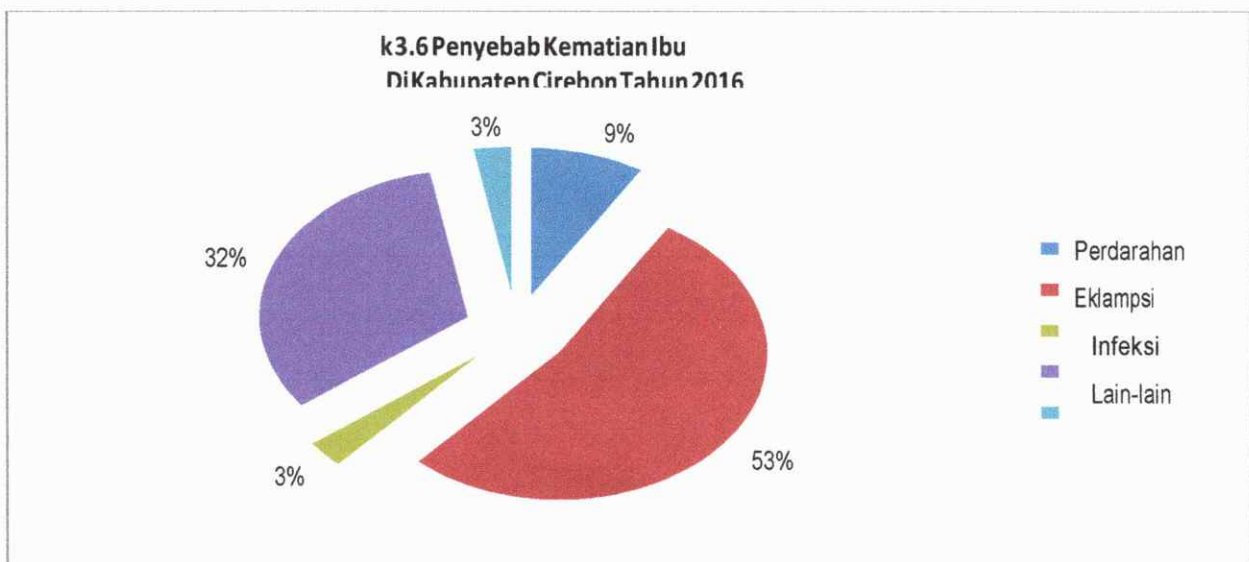
hasil Survey yang penghitungannya dihasilkan dari Survey oleh BPS Pusat. Selain itu AKI hasil Survey tidak menampilkan angka di level Kabupaten, hanya sampai dengan tingkat Provinsi. Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil SKRT tahun 1992 adalah 425 per 100.000 kelahiran hidup, dari hasil survei tersebut diketahui jumlah kematian ibu terbesar terjadi pada saat melahirkan. Sedangkan berdasarkan SKRT Tahun 1995 AKI Nasional 373 per 100.000 Kelahiran Hidup. Menurut pemetaan AKI di Jawa Barat berdasarkan Survei AKI 2003 BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan AKI terbesar di wilayah Pantura dan Cirebon (Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Kuningan) sebesar 366,80 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan yang terkecil di Bandung Raya dan Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) yaitu 296,17 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI Provinsi Jawa Barat 2003 sebesar 321,15 per 100.000 kelahiranhidup. Hasil SDKI tahun 2007 Angka Kematian Ibu di Jawa Barat sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pada SDKI 2012 Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat 359 per 100.000 Kelahiran Hidup. (Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012).

Berdasarkan pelaporan puskesmas jumlah kematian ibu maternal (ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas) yang dilaporkan dapat dilihat pada table berikut. Tabel 3.2 Jumlah Kematian Ibu maternal dan Kelahiran Hidup di Kabupaten Cirebon Tahun 2012–2016

Jumlah	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Thn 2016
Kematian Ibu	65	56	49	53	48
Kelahiran hidup	47.040	46.657	47.732	47.533	47.115

Dari 40 kecamatan terdapat jumlah kematian ibu paling besar di Kecamatan Gegesik 5 orang dan Kecamatan Palimanan 4 orang disusul Kecamatan Babakan dan Kamarang masing- masing 3 orang. Kecamatan-kecamatan lain jumlah kematian ibu dibawah 3 orang.

Proporsi penyebab kematian ibu di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2016

Penyebab kematian lain-lain paling banyak, ini merupakan kumpulan dari beberapa macam jenis penyebab kematian seperti penyakit jantung, emboli dan penyebab lain yang jumlahnya tidak dominan. Perdarahan dan Eklampsia selalu merupakan penyebab tertinggi setiap tahunnya.

Berdasarkan fasenya kematian ibu maternal yaitu kematian pada ibu hamil sebanyak 13 (27,1 %) dan ibu bersalin 9 (18,8%) dan ibu nifas 26 (54,16 %). Proporsi paling besar terjadi kematian pada fase nifas yang mencapai 54,16 %. Dengan kondisi seperti ini maka petugas seharusnya lebih meningkatkan kegiatan kunjungan pada ibu nifas atau Post Natal Care (PNC) secara kuantitas maupun kualitasnya.



Kematian ibu berdasarkan tingkat pendidikan ibu, adalah Tamat SD sebanyak 20 orang (41,67 %), Tamat SMP sebanyak 14 orang (29,16 %), SMA = 13 orang (27,8 %), Perguruan tinggi 1 orang (2,08 %). Berdasarkan kelompok umur ibu, < 20 tahun sebanyak 4 orang (8,33 %), umur ibu 20-35 tahun sebanyak 38 (79,16 %). Dan umur ibu > 35 tahun sebanyak 6 (12,5 %). Kematian ibu terbanyak pada ibu tamat SD 41,67 %, hal ini dapat dimungkinkan bahwa paling banyak dari pendidikan ibu (bumil, bulin dan bufas) adalah tamat SD sehingga kematian juga didominasi yang hanya tamat SD.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa) terus menurun, walaupun melambat sejak tahun 2002. Sementara itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami stagnasi sejak tahun 2007, dengan ARR sebesar 0,5% per tahun. Dibutuhkan ARR sebesar 3% untuk mencapai target TPB/SDGs sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030.

Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan (Service Based) jumlah kematian bayi di Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

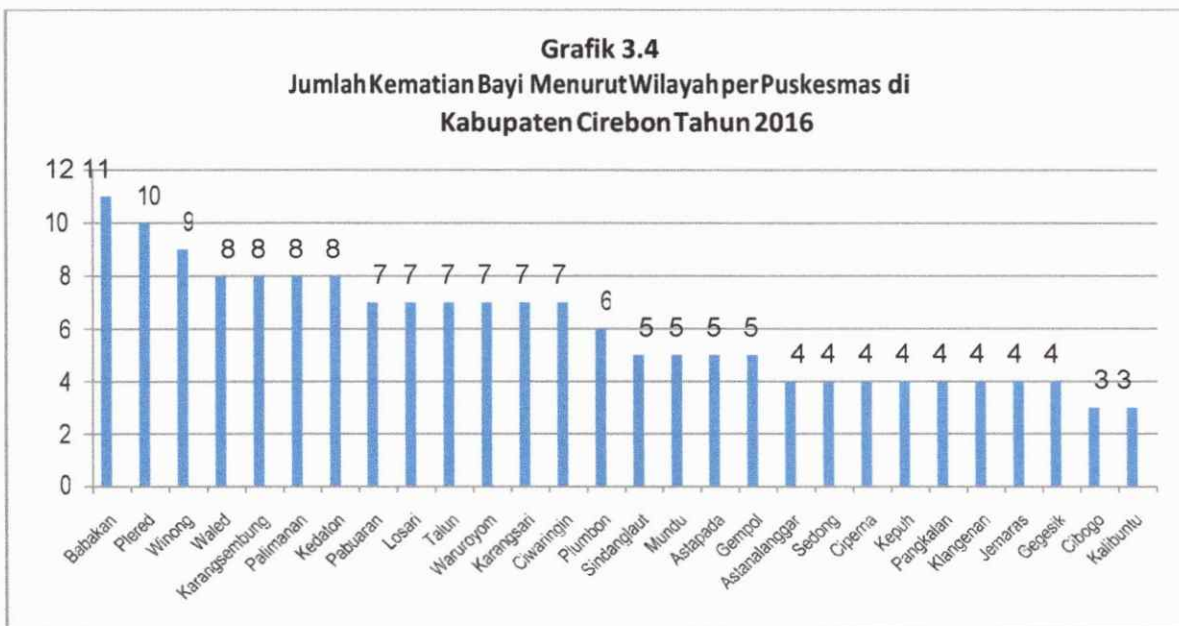
Tabel 3.1

Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup di Kabupaten Cirebon  
Tahun 2012 - 2016

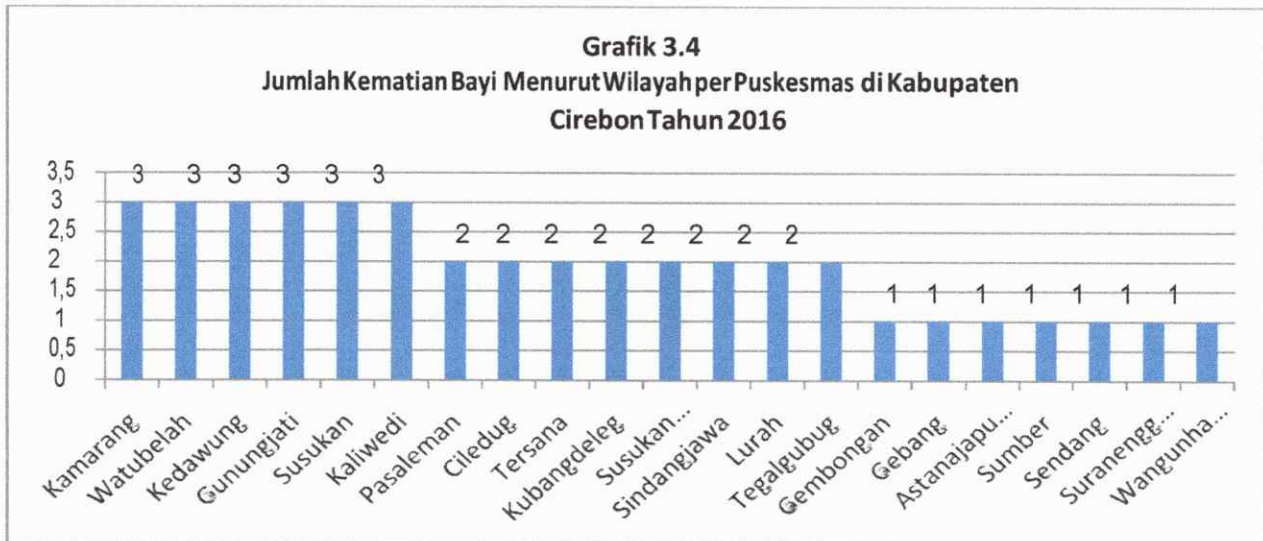
Jumlah	2012	2013	2014	2015	2016
Kematian Bayi	235	227	206	210	209
Kelahiran Hidup	47.040	46.657	47.732	47.533	47.115
Per 1000KH	4,99	4,86	4,32	4,40	4,40

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kab. Cirebon, 2016

Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (dilaporkan), tahun 2016 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jika dibandingkan dengan keadaan Kabupaten /Kota lain di Jawa Barat, angka Kematian Bayi Kabupaten Cirebon tahun 2015 berada pada urutan ke 13.







Pada tahun 2016 jumlah kematian bayi yang terlapor di Puskesmas sebanyak 209 terdiri dari 168 kematian pada neonatal (0-29 hari) dan kematian bayi usia 1-12 bulan sebanyak 40. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 47.115 maka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah 4,43 per 1000 KH. Penyebab kematian terbesar pada bayi yaitu BBLR sebanyak 57 anak (27,3%), dan Asphixia sebanyak 48 (23%).

Berdasarkan data yang dilaporkan Puskesmas jumlah kematian Anak Balita (Umur 12-59 bulan) pada tahun 2016 sebanyak 35 orang. Jumlah kematian usia 1 – 4 tahun di Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Cirebon tanpa memilah luar atau dalam wilayah domisili asal pasien terdapat 56 kematian anak. Jika dibandingkan dengan data pelaporan dari Puskesmas terdapat selisih. Hal ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal di tingkat desa/kelurahan ataupun di Puskesmas. Selain itu ada data kematian yang merupakan penduduk luar wilayah kabupaten Cirebon yang meninggal di rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon.

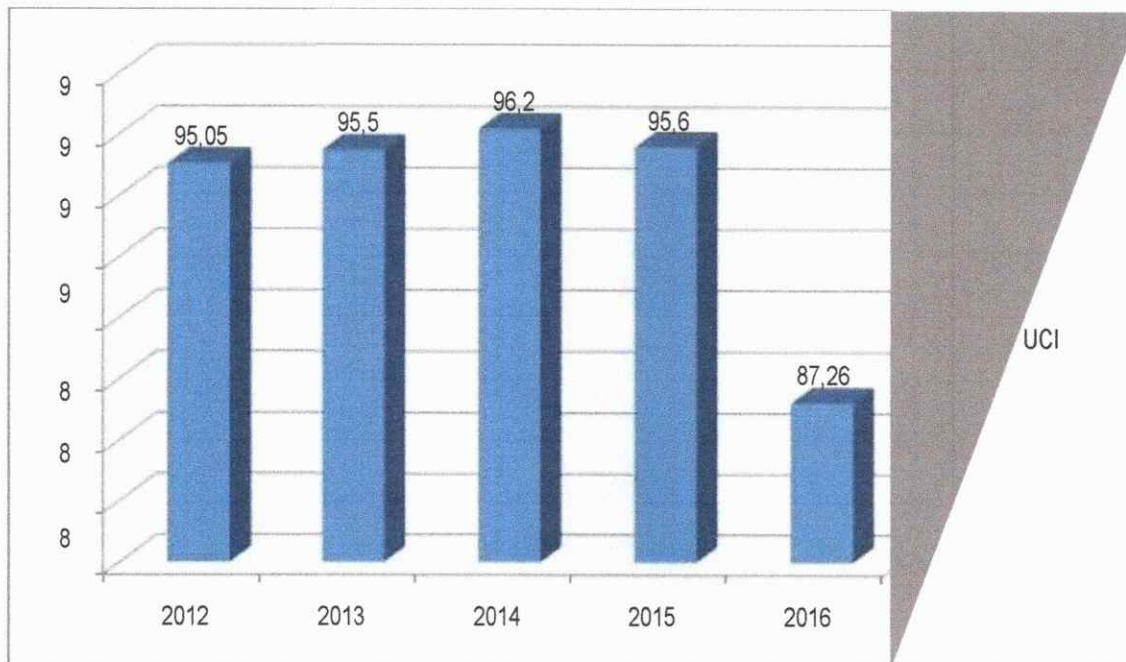
Lima penyebab kematian balita (umur 1-4 tahun) terbesar di rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2016 adalah Bronchopneumonia sebanyak 34 (27,2%), Sepsis sebanyak 20 (16%), Encephalitis sebanyak 12 (9,6%), Dengue Shock Syndrome sebanyak 10 (8,0%), dan Meningitis ada 6 (4,8%). Angka ini tanpa membedakan pasien dalam dan luar wilayah Kabupaten Cirebon.

Sementara, data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan (Gambar 5). Dalam SDKI, imunisasi dasar lengkap (IDL) didefinisikan sebagai persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi BCG, campak, dan tiga kali untuk DPT dan polio. Sementara itu, menurut Riskesdas adalah jika anak 12-23 bulan sudah mendapatkan semua jenis imunisasi: satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Tahun 2016 cakupan UCI di Kabupaten Cirebon mencapai 87,26%, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 95,6%. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator capaian UCI yang semula bersifat kuantitatif yaitu 4 (empat) indikator antigen mencapai lebih dari 80% yaitu BCG, DPT3, Polio 4 dan Campak menjadi bersifat kualitatif yaitu Imunisasi Dasar Lengkap bagi setiap bayi mencapai 80% dalam suatu desa. Sedangkan target cakupan UCI tahun 2016 yaitu 93%.



Grafik 4.6  
Cakupan UCIDesa di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 –2016



Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang menerima pengobatan ARV terus meningkat dari 2.381 orang (2010) menjadi 77.748

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% atau hampir 40 juta penduduk di atas 18 tahun dan Diabetes Melitus (DM) sebesar 6,9%. Prevalensi obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013). Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia.

Berdasarkan pelaporan yang dihimpun oleh Puskesmas dari desa-desa di Kabupaten Cirebon, jumlah seluruh kematian semua umur tahun 2016 sebanyak 29.822 kasus.

Penyebab kematian di rumah sakit tahun 2016 untuk semua golongan umur, 5 (lima) penyebab tertinggi adalah Stroke dengan perdarahan 11,4 %, Cedera kepala berat 10,7 %, Sepsis 8,2 %, Gagal Jantung kongestif 7,4 %, Syok Hipovolemik 4,9 %. Penyakit Stroke menempati urutan pertama, seperti pada tahun-tahun sebelumnya (2013-2015). Stroke ini selalu ada di urutan lima teratas dari tahun ke tahun.



Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sebesar 26,1% penduduk kurang aktivitas fisik dan 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun kurang mengonsumsi buah dan sayur (2013). Sementara, 4,6% penduduk mengonsumsi alkohol (2007), dimana 0,6% diantaranya mengonsumsi hingga level yang berbahaya menurut standar WHO.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan screening wajib pada ibu hamil; 2) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR); dan 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan diagnostic kit) dan TB. Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan. Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 187,9 juta penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya unmet need pelayanan kesehatan dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 4) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

#### **2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.**

Partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun sebesar 10,93% dari 36,52% (2010) menjadi 47,45% (2016). Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data Podes 2014, sebesar 94,72% PAUD diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai tinggi terus meningkat. Partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat sudah mencapai lebih dari 100%. APK SMP/MTs/ sederajat terus mengalami peningkatan dari 80,6% pada tahun 2010 menjadi 90,1% (2016). Tingkat partisipasi jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami peningkatan dari 62,9% (2010) menjadi 80,9% (2016). APK pendidikan tinggi meningkat dari 26,3%



(2010) menjadi 31,6% (2016). Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang. Pada tahun 2016, Rasio APK SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 0,99, rasio APK SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,05, dan rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,06. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki mencapai 1,16. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah setara.

**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Waled	227.46	79.90	119.96	74.16	94.55	82,91	51,57	76,34	62,20
2	Ciledug	231.84	67.26	105.48	70.67	97.37	82,08	54,07	75,44	63,20
3	Losari	227.07	124.98	162.43	79.92	110.47	92,94	59,84	91,41	73,29
4	Babakan	225.23	74.01	113.43	164.91	104.51	126,72	91,01	116,69	107,24
5	Karangsembung	205.38	61.02	95.16	186.25	118.11	143,11	157,34	90,81	115,23
6	Lemahabang	261.20	70.44	112.82	135.05	73.72	96,25	105,05	55,61	73,78
7	Sedong	227.17	56.58	91.82	41.16	91.13	56,46	28,01	70,39	40,99
8	Astanajapura	218.84	112.68	152.04	103.97	154.88	123,68	44,81	218,78	112,17
9	Mundu	242.06	82.57	126.42	62.11	103.70	78,35	53,53	78,19	63,16
10	Beber	234.91	59.55	95.31	92.73	86.31	89,48	81,83	66,31	73,97
11	Sumber	262.13	77.00	122.14	91.59	97.22	94,34	64,89	82,77	73,64
12	Palimanan	223.01	67.29	104.25	224.92	161.31	188,40	139,30	163,97	153,46
13	Plumbon	220.96	70.42	110.01	62.15	84.28	71,57	74,01	40,97	59,93
14	Weru	228.72	66.08	105.39	143.91	123.62	133,34	120,61	96,69	108,16
15	Kapetakan	240.34	83.09	125.94	66.14	95.13	77,42	54,33	74,34	62,12
16	Klangenan	226.99	66.39	104.69	342.91	42.67	79,97	263,81	31,50	60,36
17	Arjawinangun	234.78	92.60	135.03	92.96	117.91	104,12	69,79	101,55	84,00
18	Ciwaringin	208.56	45.85	76.22	230.82	186.34	206,45	94,66	234,03	171,02
19	Susukan	206.85	77.18	113.14	44.03	73.72	55,16	46,60	43,42	45,41
20	Gegesik	224.67	94.26	134.94	90.44	88.43	89,39	66,26	74,98	70,84
21	Susukanlebak	214.90	47.63	78.23	133.09	119.86	126,02	65,10	145,57	108,07
22	Pabedilan	214.86	64.47	101.99	120.84	88.19	102,30	65,15	98,40	84,03
23	Dukupuntang	237.03	89.84	132.54	66.03	199.40	97,78	41,01	213,39	82,05
24	Panguragan	199.68	72.88	108.85	55.70	77.43	64,84	40,58	59,46	48,52
25	Kaliwedi	208.83	52.98	86.64	52.99	83.30	64,53	33,47	86,54	53,68
26	Pangenan	221.66	71.39	111.50	87.18	126.47	103,28	54,46	122,61	82,38
27	Gebang	208.68	66.69	103.29	63.60	87.81	73,73	41,60	74,89	55,53
28	Depok	207.91	78.27	115.17	78.65	108.87	90,78	55,70	109,12	77,14
29	Kedawung	163.20	74.60	104.90	40.70	80.34	53,39	28,39	70,32	41,81
30	Karangwareng	212.69	50.49	85.11	54.51	33.67	42,52	45,12	27,65	35,07
31	Talun	213.05	71.10	109.07	81.18	39.24	52,89	59,05	32,45	41,11
32	Gunungjati	172.06	95.32	123.38	159.81	74.25	101,95	127,45	66,21	86,04
33	Pasaleman	219.60	60.20	96.31	96.92	45.24	61,69	77,88	40,31	52,26
34	Pabuaran	204.99	70.09	106.01	115.04	118.62	116,86	47,55	155,16	102,31



35	Tengahtani	210.24	69.19	107.06	149.60	36.51	60,00	119,89	29,35	48,15
36	Plered	259.84	75.69	120.89	300.00	68.78	113,76	262,36	61,83	100,84
37	Gempol	211.96	72.52	111.98	153.10	92.92	117,47	110,06	82,74	93,89
38	Greged	258.46	81.66	128.22	46.20	118.05	68,69	43,64	85,77	56,83
39	Suranenggala	208.20	81.84	119.73	259.39	97.28	141,35	181,69	95,35	118,83
40	Jamblang	227.93	79.72	121.06	126.58	85.24	101,22	96,68	64,61	77,01

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sementara, berdasarkan data Kemdikbud dan Kemenag, persentase guru yang sudah tersertifikasi meningkat dari 23,97% (2010) menjadi sebesar 48,12% (2016). Dari gambaran ini, diharapkan bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat.

**Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang pendidikan SD dan SLTP dan SLTA menurut jenis kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

No	Kecamatan	Guru SD			Guru SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Arjawinangun	56	90	146	47	44	91	19	6	25
2	Astanajapura	58	103	161	30	19	49	36	12	48
3	Babakan	90	50	140	61	34	95	21	11	32
4	Beber	89	109	198	43	51	94	37	15	52
5	Ciledug	50	70	120	10	13	23	3	1	4
6	Ciwaringin	58	102	160	39	37	76	83	56	139
7	Depok	53	61	114	8	8	16	2	0	2
8	Dukupuntang	63	64	127	17	19	36	31	19	50
9	Gebang	70	54	124	31	32	63	32	45	77
10	Gegesik	35	59	94	29	20	49	26	7	33
11	Gempol	111	193	304	66	104	170	37	22	59
12	Greged	87	119	206	56	65	121	44	26	70
13	Gunungjati	82	167	249	31	56	87	32	21	53
14	Jamblang	64	126	190	44	57	101	22	14	36
15	Kaliwedi	76	72	148	15	20	35	0	1	1
16	Kapetakan	67	134	201	18	16	34	17	6	23
17	Karangsembung	86	124	210	71	57	128	27	19	46
18	Karangwareng	60	71	131	27	20	47	22	7	29
19	Kedawung	102	65	167	22	10	32	41	19	60
20	Klangenan	118	119	237	87	46	133	36	16	52
21	Lemahabang	48	58	106	24	14	38	0	1	1
22	Losari	79	61	140	25	17	42	15	9	24
23	Mundu	87	99	186	43	25	68	37	20	57
24	Pabedilan	59	59	118	28	19	47	10	1	11
25	Pabuaran	50	61	111	27	9	36	2	0	2
26	Palimanan	43	38	81	29	11	40	2	0	2
27	Pangenan	53	93	146	59	42	101	12	6	18
28	Panguragan	100	109	209	40	41	81	6	12	18
29	Pasaleman	31	88	119	16	38	54	64	74	138



30	Plered	37	44	81	23	11	34	11	6	17
31	Plumbon	62	103	165	14	26	40	0	0	0
32	Sedong	98	117	215	34	62	96	15	5	20
33	Sumber	43	42	85	14	8	22	0	0	0
34	Suranenggala	40	67	107	36	22	58	6	1	7
35	Susukan	37	71	108	15	21	36	5	2	7
36	Susukanlebak	50	109	159	25	44	69	7	7	14
37	Talun	72	67	139	15	7	22	1	0	1
38	Tengahatani	57	36	93	22	11	33	1	0	1
39	Waled	58	79	137	20	21	41	15	8	23
40	Weru	63	82	145	21	26	47	47	29	76
JUMLAH		2.642	3.435	6.077	1.282	1.203	2.485	824	504	1.328

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

## 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Indonesia meraih capaian perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua indeks tersebut, walaupun kemajuan pencapaiannya kurang signifikan. Pada tahun 2014, IPG Indonesia adalah 90,34 dan naik menjadi 91,03 pada tahun 2015.

Berdasarkan sumber dari BP3AKB Provinsi Jawa Barat, bahwa IPG dan IDG Kabupaten Cirebon termasuk pada tingkatan yang rendah atau dibawah rata-rata IPG dan IDG Jawa Barat, Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

### IPG dan IDG Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2013

No	Kab/Kota	IPG 2013	IDG 2013
1	Bogor	63,47	61,86
2	Sukabumi	61,57	60,69
3	Cianjur	53,71	50,58
4	Bandung	69,44	46,40
5	Garut	64,76	65,85
6	Tasikmalaya	61,72	62,09
7	Ciamis	66,65	58,07
8	Kuningan	62,48	59,12
9	Cirebon	59,17	52,83
10	Majalengka	59,25	57,96
11	Sumedang	68,15	64,82
12	Indramayu	52,43	60,77
13	Subang	63,34	47,25
14	Purwakarta	63,56	65,88
15	Karawang	61,95	59,94
16	Bekasi	61,57	57,34
17	Bandung Barat	69,14	70,17
18	Pangandaran	67,27	0
19	Kota Bogor	68,38	65,02
20	Kota Sukabumi	65,07	58,60
21	Kota Bandung	71,25	68,06
22	Kota Cirebon	69,11	60,27
23	Kota Bekasi	67,79	63,50
24	Kota Depok	73,63	79,34
25	Kota Cimahi	68,56	53,10



26	Kota Tasikmalaya	69,29	54,04
27	Kota Banjar	61,00	48,95
	<b>Provinsi Jabar</b>	<b>64,61</b>	<b>68,08</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Susenas 2011-2014

Dari tabel diatas terlihat IPG dan IDG Kabupaten Cirebon 59,17 untuk IPG dan 52,83 untuk IDG sedangkan untuk Provinsi Jabar sebesar 64,61 untuk IPG dan 68,08 untuk IDG. Walaupun data terbaru belum tersedia untuk tahun 2014, angka ini masih sangat jauh jika di bandingkan dengan Kota/ Kabupaten lain di Jawa Barat.

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Indonesia masih tergolong negara ASEAN yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh pasangan:

- sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/ sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/ atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka (18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (4,9%); serta
- sekitar 28,3% perempuan yang pernah/ sedang menikah mendapat minimal 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.

2. Kekerasan oleh selain pasangan: sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah, sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual dari selain pasangan selama hidup mereka (23,7%) dan sekitar 1 dari 18 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

**Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut umur di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

No	Kabupaten Cirebon	Kelompok Umur			Total
		Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1	LSM Banati	4	6	13	23
2	P2TP2A	17	5		22
3	Kepolisian		4	10	14
4	Kejaksaan		3	9	12
5	LSM WCC Balqis	64	24	24	112

Sumber data : Banati, P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan dan Balqis Kab. Cirebon

Selanjutnya, hasil survei Kekerasan terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan sekitar 38,62% anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan umur 13-17 tahun



menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

**Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut jenis kekerasan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

No	Kabupaten Cirebon	Jenis Kekerasan											
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploitasi		Penelantaran		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	LSM Banati			1			5			2	1		
2	P2TP2A					2	1						
3	Kepolisian	1				2	4						
4	Kejaksaan	1				1	3						

Sumber data : Banati, P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan dan Balqis Kab. Cirebon











Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<18 tahun) mengalami penurunan dalam 8 tahun terakhir. Data tahun 2016 menunjukkan sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 27,4%. Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS).

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan "affirmative action" terutama melalui terobosan politik.

**Anggota DPR menurut Partai dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

NO.	PARTAI	ANGGOTA DPR		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	NASDEM	0	0	0
2	PKB	1	0	1
3	PKS	1	0	1
4	PDIP	2	0	2
5	GOLKAR	2	0	2
6	GERINDRA	1	0	1
7	DEMOKRAT	1	0	1
8	PAN	0	0	0
9	PPP	0	0	0
10	HANURA	0	1	1
11	PBB	0	0	0
12	PKPI	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon

**Anggota DPRD Kabupaten Cirebon menurut Partai dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

NO.	PARTAI	ANGGOTA DPRD Kab		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	PDI Perjuangan	8	3	11
2	PKB	7	1	8
3	GERINDRA	4	2	6
4	GOLKAR	4	2	6
5	PKS	4	1	5
6	DEMOKRAT	3	2	5
7	NASDEM	2	2	4
8	HANURA	2	1	3
9	PPP	1	0	1
10	PBB	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>

Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon



Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan Unmet Need pelayanan KB telah menurun dari 13,1% pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern meningkat dari 98,3% menjadi 98,9% dan laki-laki meningkat dari 94,1% menjadi 97,2% pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Pada tahun 2015 persentase perempuan yang memiliki telepon selular adalah 50,4% dan meningkat menjadi 52,1% pada tahun 2016. Sementara, untuk laki-laki adalah 63,4% pada tahun 2015 dan 64,4% pada tahun 2016 (Susenas 2015-2016). Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

## **2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Pada saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2015, yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs), proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan adalah 70,97%. Angka ini melampaui target MDGs sebesar 68,87%. Namun demikian, capaian air minum untuk kawasan perdesaan adalah 60,58%, masih di bawah target MDGs sebesar 65,81%. Menurut Laporan yang sama, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sejak tahun 2000 sampai 2015 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, bahkan sampai tahun 2010 perkembangannya memperlihatkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2012 sampai 2015 terjadi perubahan pencapaian yang positif setelah dilakukan koreksi BPS terhadap definisi tentang akses air minum layak. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah 62,14%, masih sedikit di bawah target MDGs sebesar 62,41%. Peningkatan akses sanitasi layak sejak tahun 2000 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.









Dalam rangka peningkatan ketahanan air, arah kebijakan pemerintah adalah memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistemnya melalui penanganan DAS termasuk penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air melalui konservasi sumber daya air, mengurangi luasan kawasan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS, serta internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).

Dalam upaya mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 21 waduk dan 3 diantaranya telah selesai, sehingga jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 adalah 208 buah. Untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya, sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah, rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap kawasan sumber air di 74 kawasan. Untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak, telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 M<sup>3</sup>/detik dalam periode 2010-2014, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tersebut mencapai 171,44 M<sup>3</sup>/detik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antara lain:

- (1) cakupan layanan sanitasi nasional yang masih rendah dan belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (11,08% atau sekitar 28,66 juta jiwa penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan);
- (2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga permintaan atas layanan sanitasi masih rendah;
- (3) dokumen perencanaan sanitasi di tingkat daerah masih ada yang belum berkualitas baik atau tidak diimplementasikan dengan baik;
- (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;
- (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan
- (6) perlunya peningkatan manajemen asset (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019).

Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah menghasilkan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa yang telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free/ODF), dari 500 desa pada tahun 2007 menjadi lebih dari 8.400 desa pada tahun 2017. Dan untuk Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2018 telah ada 135 desa ODF.



Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6.” Pada saat ini kondisi kualitas air sungai menurun karena pencemaran limbah domestik, dan parameter Chemical Oxygen Demand (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

Pada akhir 2013, kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk PDAM adalah sebesar 36,83 M<sup>3</sup>/detik, sehingga tantangannya adalah memanfaatkan kapasitas air baku yang sudah tersedia. Permasalahan lainnya adalah lokasi potensi sumber-sumber air baku tidak selalu berdekatan dengan lokasi kawasan perkotaan dan permukiman, sehingga di beberapa daerah masih terjadi kekurangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Sejumlah peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air telah banyak diterbitkan. Dengan telah dibatalkannya UU No. 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, maka PP No. 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, yang merupakan salah satu turunan UU No. 7/2004 juga turut batal demi hukum. Meskipun sudah terbit PP No 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, akan tetapi Undang-undang yang baru pengganti UU No 7/2004 masih tetap diperlukan.

### **2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Perkembangan Ekonomi Makro. Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa triwulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 5,02% pada 2016. Pencapaian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, berkurangnya defisit transaksi berjalan dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD). Demikian pula PDB per kapita menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PDB per kapita Indonesia sebesar 28,77 juta rupiah dan terus meningkat sampai mencapai 47,96 juta rupiah pada tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan perlambatan pada suatu waktu. Pada tahun 2014 mencapai 5,07 persen. Namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 4,88 persen dan kemudian meningkat 5,63 persen tahun 2016. Pada tahun 2017 juga mengalami perlambatan yang hanya mencapai 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 dicapai oleh kategori Real Estate sebesar 9,73 persen. Kategori ekonomi yang lain pun seluruhnya tumbuh positif. Pertumbuhan terendah tercatat kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,22 persen. Dari sisi pengeluaran, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 50 persen). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 34 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah 7 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki peran yang relatif kecil sekitar 1 persensaja. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.



Pada tingkat nasional, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang dilihat dari PDB per tenaga kerja menunjukkan arah yang serupa dengan laju pertumbuhan PDB per kapita yaitu tetap tumbuh namun cenderung stagnan dan melambat. Laju pertumbuhan PDB menurut sektor dari periode 1990-2000 ke periode 2000-2016 memiliki nilai yang bervariasi. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian dan jasa menunjukkan peningkatan yang nyata, sedangkan terjadi penurunan laju pertumbuhan bagi sektor industri dan manufaktur.

Secara umum Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, baik di tingkat global maupun nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang relatif lambat dan meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama sehingga menghambat aktivitas perdagangan global;
2. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena aging population di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah;
3. Belum optimalnya ruang untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih dihadapkan pada kondisi peningkatan rasio penerimaan perpajakan;
4. Pengaruh cuaca ekstrim pada tahun 2016 yang menjadi penyebab utama turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura dan mundurnya musim panen;
5. Produktivitas nasional yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2016 berdampak pada terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja ini terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,61% pada Agustus 2016. Penurunan tersebut sejalan dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta pekerja. Walaupun demikian, angka TPT pada tahun 2016 masih belum memenuhi sasaran kuantitatif pada RKP 2016, yaitu sekitar 5,2-5,5%.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, masih perlu upaya besar untuk mencapai target TPT sesuai RPJMN pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,0-5,0%. Hal ini karena perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan rendahnya penamban-ahan kesempatan kerja yang jauh dari target 2 juta per tahun, yaitu hanya sekitar 191.173 ribu. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2016 terjadi pada sektor jasa dan lainnya yang mencapai 3,29 juta pekerja atau sebesar 91,4%. Kemudian pada sektor industri hanya menyerap sekitar 7,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja tahun 2016.

Penambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar perlu dicermati kualitasnya, karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Kerentanan dan ketidakpastian kesempatan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sampai saat ini. Kerentanan dan ketidakpastian tersebut tercermin dari tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja dan upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Capaian saat ini menunjukkan persentase pekerja formal terus meningkat dari 40,62% pada Agustus 2014 menjadi 42,40% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja formal sekitar 30 juta orang berada pada sektor jasa dan lainnya, disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Persentase jumlah pekerja informal juga menurun dari 59,38% pada Agustus 2014 menjadi 57,6% pada



Agustus 2016. Sebagian besar pekerja informal mencapai 49% berada pada sektor pertanian. Walaupun terjadi penurunan pekerja informal, tetapi masih terdapat hampir setengah penduduk yang bekerja pada sektor informal dengan produktivitas, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah daripada sektor formal. Meningkatnya persentase tenaga kerja formal diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET) pada tahun 2016 masih relatif besar yaitu sebesar 23,19%. Proporsi ini telah menurun dari tahun 2010 sebesar 25,66%. Sebagian besar tingkat NEET tersebut didominasi oleh perempuan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk lebih mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Tabel 5 menunjukkan perkembangan upah yang diperoleh pekerja berdasarkan sektor, apabila dilihat pada indeks upah riil. Pada sektor pertambangan non-migas terjadi penurunan upah riil pada tahun 2014, hal ini bersamaan dengan momentum lemahnya harga komoditas pertambangan di pasar global beberapa tahun terakhir ini. Namun, lain halnya pada sektor pariwisata, meningkatnya promosi pariwisata Indonesia mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja sektor perhotelan dan upah riil.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi konflik hubungan industrial termasuk demonstrasi tuntutan pekerja/ buruh yang erat kaitannya dengan pengupahan atau kenaikan upah minimum yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dari sisi pekerja. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha agar terlaksana perundingan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (skill mismatch dan underqualified);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;
8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) nonpertanian mendominasi sekitar 98,33% dari total unit usaha secara keseluruhan. Dominasi lapangan usaha non-pertanian tersebut, antara lain: (1) perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; (2) akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman; dan (3) industri pengolahan. Kontribusi UMK terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi,



### **BAB III**

#### **TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

##### 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 1.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMN 2015–2019 diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:

1. Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
2. Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menysasar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.
3. Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha

Program Tujuan 1.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1) penanganan fakir miskin; (2) jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (3) pemenuhan kebutuhan dasar; (4) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi; (5) penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (6) pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); (7) program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; (8) penataan kelembagaan jaminan sosial (Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN); (9) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (10) koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; (11) pemenuhan kebutuhan dasar; (12) bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (13) pembinaan kesehatan masyarakat; (14) pembinaan surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra; (15) pencegahan dan pengendalian penyakit; (16) kefarmasian dan alat kesehatan; (17) kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; (18) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; (19) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (20) penyehatan lingkungan; (21) pengembangan perumahan; (22)



pengembangan pembiayaan perumahan; (23) pemberdayaan sosial; (24) penyediaan perumahan layak; (25) pendidikan dasar dan menengah: penjaminan kepastian layanan pendidikan SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan sederajat, SMA/MA/SMK dan sederajat; (26) penataan administrasi kependudukan; (27) perlindungan anak; (28) pengelolaan ketenagalistrikan; (29) koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana; (30) koordinasi kebijakan penanganan pascabencana; dan (31) perlindungan dan jaminan sosial: perlindungan sosial korban bencana.

Selain melalui program kementerian/lembaga, terdapat tiga program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Ketiga program tersebut adalah (1) Youth in Action for Urban Resilience yang merupakan kontribusi Pusat Inkubasi Usaha Kecil Konsulindo (PINBUKINDO); (2) Sosialisasi penghimpunan dana ZISWAF untuk penyediaan energi dan air di perdesaan dengan menggunakan panel surya yang merupakan program kontribusi lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia; dan (3) Emergency Situation Training (EST) yang merupakan program kontribusi Sekolah Relawan.

Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

### **3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan**

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2.

Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilisasi harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga yang terjangkau. Bersamaan dengan itu, upaya untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, diantaranya: (1) Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada berkelanjutan komoditas beras dan jagung dan peningkatan penyediaan pangan untuk komoditas kedelai, gula tebu, daging sapi, bawang merah, dan cabai;



(2) Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan sawah, penyediaan pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, long storage, serta bangunan air lainnya; dan peningkatan indeks pertanaman; (3) Percepatan produksi dan perbanyak benih tanaman VUB yang memiliki kemampuan adaptif terhadap cekaman lingkungan dan sesuai minat pengguna/petani; (4) Penyediaan sarana produksi pupuk dan benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan petani; (5) Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; (6) Fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; (7) Penguatan cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (8) Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (9) Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk olahan) terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah, menyediakan pangan beragam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; (10) Pemberdayaan petani kecil/kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk pangan; dan (11) Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan antarnegara.

Sementara itu upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, diantaranya adalah:

- (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif;
- (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;
- (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal;
- (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
- (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan;
- (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya;
- (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
- (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan
- (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).



Program Tujuan 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMN 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) pelayanan kesehatan dan gizi bagi bayi, balita, remaja, dan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian suplementasi, dan pendidikan kesehatan dan gizi; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk imunisasi dan pemberian obat cacing pada anak; (b) penyehatan lingkungan terutama perluasan akses air bersih dan sanitasi; (3) peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi; (4) pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; (5) peningkatan status kesehatan dan gizi anak sekolah; (6) peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat; (7) peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan; (8) bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar; dan (9) perluasan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

### **3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan dalam RPJMN diarahkan pada: 1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 6) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 7) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 8) meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 9) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 10) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 11) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan 12) mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pelayanan kesehatan jiwa; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan



SDM kesehatan. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

### 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu, pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- (2) Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
- (3) Peningkatan kualitas, profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang merata;
- (4) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
- (5) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
- (6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun;
- (7) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan;
- (8) Penumbuhan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa; dan
- (9) Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian



bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan pembinaan, dan perlindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

### **3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui: (1) pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu tentang konseling kesehatan reproduksi remaja; (2) peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatankelompok keluarga remaja; dan (4) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pemberi pelayanan.

Ketiga, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas melalui: (1) pemberian dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu; (2) peningkatan pemahaman bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan menengah; (3) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan; (4) penyediaan bantuan operasional sekolah; (5) penyediaan layanan khusus bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus.

Keempat, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;



(4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. □

Kelima, meningkatkan KIE dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui: (1) peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBP); dan (2) penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.

Keenam, meningkatkan jangkauan pelayanan internet berpita lebar dan peningkatan literasi digital melalui perluasan jaringan dan pendidikan.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ; (2) Program perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia; (3) Program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PP dan PA; (4) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik (5) Program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; (6) Program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum, serta Komisi Nasional Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Program manajemen peradilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB/SDGs. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam matriks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari Pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam matriks terlampir.

Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

### **3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 6 ini dicapai melalui pencapaian target-target sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk pencapaian target-target TPB/SDGs lima tahun pertama (2015-2019), indikator-indikator yang dikembangkan dijabarkan dari kebijakan RPJMN 2015-2019, yaitu prinsip-prinsip ketahanan air, sinergitas antara air minum dan



sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta ekosistemnya.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan yang terkait revolusi mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut: perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (reduce, reuse, recycle). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral, apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-program pemerintah.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi; (b) Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (c) Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan; serta (d) Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyehatan Lingkungan; (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air; serta (5) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; (b) Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS; serta (c) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

### **3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan



pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 20 sebagaimana tertera pada tabel 15.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kelompok kebijakan (1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi Makro meliputi :
  1. Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;
  2. Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi;
  3. Prioritas pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta;
  4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (i) peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (iii) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin;
  5. Diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor barang nonmigas;
  6. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan smelter, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;
  7. Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.
- b. Dalam rangka Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif meliputi :
  1. Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi;
  2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi pasar kerja;
  3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri;
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;
  5. Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan kewirausahaan;
  6. Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip collective bargaining dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;



7. Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja;
  8. Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.
- c. Dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui
1. Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.
  2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.
  3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan.
  4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor.
- d. Dalam rangka Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan melalui
1. Pemasaran pariwisata nasional melalui pembentukan pusat promosi pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih, serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;
  2. Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;
  3. Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata; 4. Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs sebagaimana termuat dalam matriks 2. Beberapa program dan kegiatan organisasi nonpemerintah tersebut, antara lain: (1) studi dan pemberdayaan keberantaraan sektor kopi sebagai upaya meningkatkan nilai lebih bagi petani; (2) survei dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha (terutama perempuan) dalam rantai hulu hilir usaha sektor kopi, garmen, dan alas kaki; (3) penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; (4) identifikasi gap kebijakan (program, anggaran, dan kelembagaan) di daerah; (5) asistensi terhadap pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah terkait pelatihan kerja; (6) pembangunan kemitraan multipihak dalam pelatihan kerja; serta (7) menyusun panduan teknis pelaksanaan Tujuan 8 TPB/SDGs untuk pemerintah daerah.

Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.



## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

**Tujuan Pemantauan dan Evaluasi.** Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

**Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.** TPB/SDGs mencakup 8 atau 10 tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs yang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBD maupun sumber pembiayaan lain yang sah.

#### **4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme Pemantauan RAD Alur pemantauan RAD dilakukan dengan mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Daerah TPB dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.137-Bappelitbangda/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.



Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Kabupaten setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat kabupaten yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs kabupaten melaporkan capaian RAD kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs provinsi

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak Non Pemerintah Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assessment tool, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan.

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Indonesia. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan,



pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs. Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah daerah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

**Pj. BUPATI CIREBON**

TTD

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI B



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024	
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
INDIKATOR : Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap												
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi												
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Bayi dan Balita	Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Penanganan Komplikasi neo, MTBS dan SIDDTK	Orang	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	19.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Pelayanan bayi muda dgn MTBM Peningkatan kunjungan bayi dan balita	Orang	231.162	231.162	231.162	231.162	231.162	231.162	231.162	138.697	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 3 : Peningkatan Imunisasi	Tertaksananya pelayanan imunisasi pada bayi dan anak di bawah dua tahun	Orang	231.162	231.162	231.162	231.162	231.162	231.162	231.162	277.394	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Filantropi
Kegiatan 4 : Penyiapan tenaga vaksinator terlatih	Setiap PKM dan pustu memiliki Tenaga vaksinator / pelaksana cold chain yang telah mengikuti pelatihan menggunakan modul latihan tenaga imunisasi	Puskesmas dan pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM 2 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>												
Kegiatan 1 : Surveilans dan Karantina Kesehatan	1. Puskesmas yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasi	Puskesmas	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan



Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon

NOMOR : 4 Tahun 2019

TANGGAL : 12 Februari 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

MATRIK TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON OLEH KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan										Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>																
<b>TUJUAN : TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN</b>																
INDIKATOR : Tingkat kemiskinan Ekstrim																
INDIKATOR : Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah																
INDIKATOR : Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan																
INDIKATOR : Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan																
<b>PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>																
Kegiatan 1 : Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	Terdokumentasikannya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Sosial
Kegiatan 2 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin yang mempunyai Keterampilan	Kepala Keluarga	4.366	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	2.616	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Sosial,	
Kegiatan 3 : Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan	Pendamping PKH memahami	Kecamatan Lokasi PKH	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6.600	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Dinas Sosial,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 4 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	PRSE yang mempunyai Keterampilan	Orang	800	800	800	800	800	767	767	4.767	APBD, BANPROV,	Diras Sosial
Kegiatan 5 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial Mempunyai Keterampilan Dan Memiliki KUBE (lokasi: panganan, gebang, babakan, pabedian)	orang	100	100	100	100	100	100	100	6.000	APBD, BANPROV,	Diras Sosial
Kegiatan 6 : Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluaraga di Kecamatan,	Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Kelompok	12	8	8	8	8	8	8	260	APBD, BANPROV,	Diras Sosial
Kegiatan 7 : Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin / BPNT	Desa dan Kelurahan yang di fasilitasi Raskin/BPNT	Desa / Kelurahan	72	70	70	70	70	70	70	8.480	APBD, BANPROV,	Diras Sosial,
Kegiatan 8 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Eks	Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks WTS) Yang Telah Mempunyai Keterampilan	Orang	60	60	60	60	60	60	60	1.800	APBD, BANPROV,	Diras Sosial







Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya												
<b>PROGRAM 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>												
<b>Kegiatan 1 :</b> Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	Kepala Keluarga	50	50	50	50	50	49	49	8.970	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Sosial, DPKPP,
<b>Kegiatan 2 :</b> Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlayannya PMKS yang singgah	Orang	200	200	200	200	200	200	200	1.200	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Sosial,
<b>Kegiatan 3 :</b> Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Jalanan	Bertambahnya Anak Jalanan yang memiliki KUBE	Orang	50	50	50	50	50	50	50	1.500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Sosial
<b>Kegiatan 4 :</b> Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Bertambahnya AMPK yang memiliki KUBE	Orang	50	50	50	50	50	50	50	300	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Dinas Sosial
<b>Kegiatan 5 :</b>		Orang	60	60	60	60	60	60	60	360	APBD, BANPROV,	Dinas Sosial,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Bertambahnya ABHn yang memiliki KUBE									APBN,		
Kegiatan 6 : Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Korban bencana mendapat bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	1.200	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Dinas Sosial, BPBD
Kegiatan 7 : Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial
<b>PROGRAM 3 : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karang Taruna yang telah mempunyai ketrampilan</li> <li>▪ Bertambahnya Karang Taruna yang memiliki KUBE</li> </ul>	Orang	100	100	100	100	100	100	100	3.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial
Kegiatan 2 : Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan sosial	Kecamatan	10	10	5	5	5	5	5	400	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Sosial



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 3 : Peningkatan Kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Bimbingan sosial kepada PSM. 40 PSM	Kelompok	40	40	40	40	40	40	40	40	600	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Sosial
Kegiatan 4 : Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial	Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan social, 1000 orang	Orang	200	200	200	200	100	100 (kumulatif)	100 (kumulatif)	600	APBD, BANPROV,	Setda, Dinas Sosial,	
Kegiatan 5 : Peningkatan Keterampilan Tenaga Pendamping Sosial	tenaga pendamping yang mendapat bimbingan	orang	40	40	40	40	40	40	40	450	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial,	
Kegiatan 6 : Pelatihan dan Pemantapan Relawan Penanggulangan Bencana	Terlatihnya Relawan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	orang	80	80	80	80	80	80	80	900	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial, BPBD, Filantropi	
<b>PROGRAM 4 : Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo</b>													
<b>Kegiatan 1 :</b>													
Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia	Lanjut Usia Yang Mendapat Bantuan Sosial	Orang	100	100	100	100	100	100 (kumulatif)	100 (kumulatif)	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial, BKAD	
<b>Kegiatan 2 :</b>													
Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Bertambahnya panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial	Panti	40	40	40	40	40	40	40	720	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial,	



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
<b>PROGRAM 5 : Program Pembinaan Anak Terlantar</b>												
Kegiatan 1 : Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE	Kelompok	50	50	50	50	50	50	50	900	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Dinas Sosial,
INDIKATOR : Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)												
INDIKATOR : Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat												
<b>PROGRAM 1 : Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>												
Kegiatan 1 : Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Termasuk Ke Dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Kepala Keluarga	70	70	70	70	70	70 (kumulatif)	70 (kumulatif)	30.600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
Kegiatan 2 : Meningkatkan Jaminan Dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan	Terlayannya PBI Daerah Peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	Jiwa	213.645	213.645	213.645	213.645	213.645	213.645	213.645	640.935	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
INDIKATOR : Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar												
<b>PROGRAM 1 : Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>												
Kegiatan 1 : Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin	Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	179	179	179	179	179	179	179	6.409	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Sosial,
Kegiatan 2 : Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	Bantuan sosial kepada ODKB sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	80	80	80	80	80	80	80	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Sosial,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 3 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Orang	60	60	60	60	60	60	60	60	900	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Sosial,
Kegiatan 4 : Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi Para Penyandang Disabilitas	Orang	144	144	144	144	144	144	144	144	2.160	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Dinas Sosial,
Kegiatan 5 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Eks Kronis	Orang	179	179	179	179	179	179	179	179	864	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial,
Kegiatan 6 : Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Disabilitas	Orang	179	179	179	179	179	179	179	179	648	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Kegiatan 7 : Sosialisasi Program Kegiatan bagi Keluarga dengan Penyandang Disabilitas Eks Psikotik	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	540	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON												
INDIKATOR : Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.												
PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga	Orang	1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	23.976	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
		2. Puskesmas dan Pustu yang melaksanakan kelas ibu hamil	128	128	128	128	128	128	128	768	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
		3. Puskesmas dan Pustu yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (PAK)	128	128	128	128	128	128	128	2.565	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Orang	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	30.238	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
PROGRAM 2 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil												
Kegiatan 1 : Sosialisasi Kesehatan bagi Ibu Hamil	Orang	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang pelayanan antenatal ke empat (K4)	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
			300	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN
Kegiatan 2 : Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	Peningkatan jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>														
	2. Puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi	Puskesmas	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan		
<b>PROGRAM 3 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil</b>														
Kegiatan 1:	Sosialisasi Kesehatan bagi Ibu Hamil	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang pelayanan antenatal ke empat (K4)	Orang	300	300	300	300	300	300	57 (100%)	57 (100%)	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 :	Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	Orang	300	300	300	300	300	300	57 (100%)	57 (100%)	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
<b>PROGRAM 4 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita</b>														
Kegiatan 1:	Sosialisasi pada Pasangan Usia Subur yang memiliki Bayi dan balita	Peningkatan dan pemahaman Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan balita tentang imunisasi dasar lengkap	Orang	300	300	300	300	300	300	57 (100%)	57 (100%)	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 :	Pendampingan Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan balita	Peningkatan jumlah pelayanan imunisasi dananaki di bawah dua tahun	Orang	300	300	300	300	300	300	57 (100%)	57 (100%)	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>INDIKATOR : Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Pelayanan Kontrasepsi</b>													
Kegiatan 1 : Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) MOP/MOW	Orang	354.676	354.676	354.676	354.676	354.676	354.676	354.676	354.676	212.806	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A
<b>PROGRAM 2 : Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi</b>													
Kegiatan 1 : Sosialisasi KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan pengetahuan PUS tentang berbagai macam metode KB dan dampaknya	Orang	300	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A
Kegiatan 2 : Pendampingan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan jumlah kepesertaan KB	Orang	300	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A
<b>INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>													
<b>INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>													
<b>INDIKATOR : Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>													
<b>PROGRAM 1 : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>													
Kegiatan 1 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan	1. Sambungan Rumah (SR) dikawasan regional	SR	5	10	10	10	10	10	10	10	165	APBD, BANPROV, APBN	Diskominruntan, Dinas Kesehatan,
	2. Sambungan Rumah (SR) di Ibukota Kawasan	SR	5	10	10	10	10	10	10	10	165	APBD, BANPROV	Diskominruntan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>														
Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3. Sambungan Rumah (SR) diperdasaan berbasis masyarakat	SR	5	10	10	10	10	10	10	10	165	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan,	
	4. Sambungan Rumah (SR) dikawasan kumuh perkotaan	SR	5	10	10	10	10	10	10	10	165	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan, PDAM	
	5. Sambungan Rumah (SR) dikawasan nelayan	SR	5	10	10	10	10	10	10	10	165	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan,	
	6. Sambungan Rumah (SR) dikawasan rawan air	SR	5	10	10	10	10	10	10	10	165	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan, F	
	7. Kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM PDAM	Kawasan	14	14	14	14	14	14	14	14	420	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan, PDAM,	
	8. Kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM Non- PDAM	Kawasan	14	14	14	14	14	14	14	14	420	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan,	
	9. Kecamatan mendapatkan pembinaan dan pengembangan air minum	Kecamatan	5	10	10	5	5	5	5	5	420	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan, Filantropi	
	Kegiatan 2 :													
	Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Kecamatan	5	10	10	5	5	5	5	5	5	2.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskinrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, F



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 3 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengenangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengenangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	1. Terbangunnya IPAL Terpusat Skala Kota	Kecamatan	5	10	10	5	5	5	5	2.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
			2. Tebangunnya IPAL Terpusat Skala Kawasan	5	10	10	5	5	5	2.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas Kesehatan, Dinas LH,
			3. Terbangunnya IPLT Setempat	5	10	10	5	5	5	2.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas Kesehatan, Dinas LH,
<b>PROGRAM 2 : Pengendalian Penyakit Dan Penyakit Lingkungan</b>												
Kegiatan 1: Kegiatan Penyehatan Lingkungan	Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Desa / Kelurahan	260	272	283	295	307	318	318	8.675	APBD, BANPROV,	Diskrimntan, Dinas Kesehatan,
			Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	260	272	283	295	307	318	318	8.675	APBD, BANPROV,
<b>INDIKATOR : Persentase Rumah Kumuh Perkotaan</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau</b>												
<b>PROGRAM 1 : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>												
Kegiatan 1 : Keg. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	1. Kawasan kumuh perkotaan	Ha	78,78	65,65	52,52	39,39	26,26	13,13	13,13	32.825	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PMD, desa
			1. Jumlah MBR yang menerima pemberdayaan dan meningkatkan keswadaanyaannya	10	10	10	10	10	10	10	750	APBD, BANPROV, APBN
Kegiatan 2 : Pengembangan Perumahan Swadaya	1. Jumlah MBR yang menerima pemberdayaan dan meningkatkan keswadaanyaannya	MBR	10	10	10	10	10	10	10	750	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas PMD



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>														
Kegiatan 2 : Pengembangan Perumahan Swadaya	2. Jumlah Rumah Tangga yang Terasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya	RT	10	10	10	10	10	10	10	10	750	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan, desa	
		RT	10	10	10	10	10	10	10	10	750	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan,	
	4. Jumlah rumah tangga , daerah terpencil, pedesaandan daerah tertinggal yang terfasilitasi peningkatan kualitas rumah	RT	10	10	10	10	10	10	10	10	750	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan,	
		RT	10	10	10	10	10	10	10	10	750	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan,	
<b>INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat</b>														
<b>PROGRAM 1 : Pendidikan Dasar</b>														
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	1. Ruang Kelas SD yang dibangun	Ruang	5	5	5	5	5	5	5	5	43.703	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan Dinas Pendidikan	
		2. Sekolah SD yang dibangun	Sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan Dinas Pendidikan
	3. Ruang kelas SD yang direhabilitasi	Ruang	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8.100	APBD, APBN, BANPROV,	Diskimrumtan Dinas Pendidikan
		4. Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Kecamatan	40	40	40	40	40	40	40	40	6.390	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan Dinas Pendidikan



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	5. SD yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	923	923	923	923	923	923	923	576	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan
	6. SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Sekolah	155	155 (lanjutan)	155 (lanjutan)	155 (lanjutan)	155 (lanjutan)	148 (lanjutan)	148 (lanjutan)	92.300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan
	7. SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah	155	155 (lanjutan)	155 (lanjutan)	155 (lanjutan)	155 (lanjutan)	148 (lanjutan)	148 (lanjutan)	557	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan
	8. Siswa SD penerima bantuan melalui KIP	Orang (siswa)	20.193	20.193	20.193	20.193	20.193	20.193	20.193	145.390	APBD, APBN, BANPROV,	Dinas Pendidikan
	INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat											
	INDIKATOR : Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran											
	PROGRAM 1 : Pendidikan Menengah Pertama											
	Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	1. Siswa SMP yang mendapatkan bantuan operasional SMP Terbuka	Orang	140	140	140	140	140	140	140	840	APBD, BANPROV, APBN
2. SMP Terbuka yang menerima bantuan operasional		Sekolah	25	25	25	25	25	25	25	408	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan
3. Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional		Orang	500	500	500	500	500	500	500	594	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan
4. Sekolah berasrama yang dibangun		Sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	12.000	APBD, BANPROV, APBN

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>															
Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	5. Sekolah SMP yang dibangun	Sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	12.000	APBD, APBN, BANPROV	Dinas Pendidikan		
	6. Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun	Sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	43.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan		
	7. Ruang kelas SMP yang dibangun	Ruang	30	30	30	30	30	30	30	30	43.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan		
	8. Ruang kelas SMP yang direhabilitasi	Ruang	60	60	60	60	60	60	60	60	27.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan		
	9. Siswa SMP yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi	Orang	780	780	780	780	780	780	780	780	936	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan		
	10. Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Sekolah	30	30	30	30	30	30	30	30	18.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan		
	11. SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah	30	30	30	30	30	30	30	30	900	APBD, APBN, BANPROV	Dinas Pendidikan		
	12. Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	Orang	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	15.615	93.690	APBD, APBN, BANPROV	Dinas Pendidikan		
	<b>PROGRAM 2 : Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>														
	Kegiatan 1 :														
	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	Anak yang memiliki akta kelahiran	orang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapi,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk	Terbitnya Surat Pindah, Datang dan SKTT. 15.000 Surat Pindah, 12.000 Surat Datang, 100 SKTT	Surat	4516	4516	4516	4516	4516	4516	4516	2.709	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 3 : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendataan Penduduk	Terbitnya kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan pendataan penduduk mobile	Lembar (KTP Elektronik dan Kartu Keluarga)	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	806	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil
Kegiatan 4 : Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Terbitnya dokumen kependudukan orang terlantar	Lembar (KTP Elektronik dan Kartu Keluarga)	325	325	325	325	325	325	325	195	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 5 : Pelayanan Perakaman KTP-EI Secara Mobile	Perakaman KTP-el dan Penerbitan KK&KTP-el secara mobile	Orang	43.674	43.674	43.674	43.674	43.674	43.674	43.674	4.367	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 6 : Pengawasan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Operasi Yustisi)	Terperiksanya kepemilikan KTP-el di masyarakat	Orang	218.370	218.370	218.370	218.370	218.370	218.370	218.370	21.837	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 7 : Pelayanan Kartu Identitas Anak	Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA)	Anak	33.655	33.655	33.655	33.655	33.655	33.655	33.655	30.238	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>PROGRAM 3 : Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>													
Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Pemberitan Akta Kelahiran Secara Online + SMS Gateway	Terpenuhnya Data Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Cirebon	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 2 : Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Cirebon	Terpenuhnya Data Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Cirebon	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 3 : Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile	Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian sesuai SOP	Orang	800	800	800	800	800	800	800	800	540	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
Kegiatan 4 : Peningkatan Pelayanan dan Pemberitan Akta Kelahiran dan Kematian	Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian sesuai SOP	Orang	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	540	APBD, BANPROV, APBN	Disdukcapil,
INDIKATOR : Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan													
INDIKATOR : Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan													
PROGRAM 1 : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah													
Kegiatan 1 : Penataan Penguasaan Tanah	Tersedianya sistem penataan, penguasaan, pemilikan, dan pengalihan hak atas tanah	Dokumen / sistem	1	1	1	1	1	1	1	1	500	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, BPN,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 1 : Penataan Penguasaan Tanah	Tersedianya informasi penggunaan tanah berupa data dan peta	Dokumen / sistem	1	1	1	1	1	1	1	1	500	APBD, BANPROV, APBN	Berenlitbangda, Diskimrumtan, BPN,
Kegiatan 2 : Penyempurnaan Kelembagaan dan Pengembangan Administrasi Pertanahan	Tersedianya dokumen pertanahan dengan menggunakan teknologi mutakhir	Dokumen / sistem	1	1	1	1	1	1	1	1	1.000	APBD, BANPROV, APBN	Berenlitbangda, Diskimrumtan, BPN,
Kegiatan 3 : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pertanahan	Adanya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas penataan pertanahan bagi petugas DPKPP	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	-	300	APBD, BANPROV, APBN	Diskimrumtan, BPN,
Kegiatan 4 : Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terpenuhnya kebutuhan Tanah untuk kepentingan Umum di 11 lokasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanah untuk Pembangunan Kampus ITB</li> <li>▪ Tanah untuk TPSA</li> <li>▪ Tanah untuk Pembangunan Mesjid di Gunungglati</li> <li>▪ Tanah untuk BBI Perikanan</li> <li>▪ Tanah untuk Balai Pembibitan Sapi</li> <li>▪ Tanah untuk Kantor UPT Pertanian</li> <li>▪ Tanah untuk Kantor Dandkar</li> </ul>	lokasi	4	4	3	-	-	-	-	-	109.355	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Berenlitbangda, Diskimrumtan, BPN,







Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Konsumsi dan Keamanan Pangan	7. Penanganan Keamanan Pangan segar tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	8. Terlaksananya pemantauan dan pemertapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (termasuk skor PPH dan tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan
	9. Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM 2 : Gizi Masyarakat</b>													
Kegiatan 1 : Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk dirawat sesuai standar	Orang	182	137	102	77	58	43	43	898	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas kesehatan	
	2. Presentase bayi usia 0-8 bulan mendapat ASI Eksklusif	Orang	182	137	102	77	58	43	43	898	APBD, BANPROV, APBN	Dinas kesehatan	
	3. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	Kepala Keluarga	455.874	470.869	485.859	500.852	515.845	529.778	529.778	898	APBD, BANPROV, APBN	Dinas kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan	





Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 5 : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah	Kelompok	2	4	6	8	10	12	12	1.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM,
Kegiatan 5 : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	ton	28.000	29.400	30.870	32.414	34.034	35.736	35.736	12.000	APBD, BANPROV, APBN	Dislakan,
Kegiatan 6 : Peningkatan Prod. Perikanan Budidaya	Volume produksi (juta ton)	Lokasi	8	8	8	8	8	8	8	18.000	APBD, BANPROV, APBN	Dislakan
Kegiatan 7 : Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin (juta ton)	Ton	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233	19.144	19.144	1.800	APBD, BANPROV, APBN	Dislakan, Dinas Perdagangan Perindustrian,
Kegiatan 8 : Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pemberdayaan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional dan kabupaten (kg)</li> <li>▪ Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar</li> <li>▪ Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan GEMARAKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)</li> </ul>	Kg per kapita  Unit  lokasi	25,50  1	26,78  2	28,11  3	29,52  4	31,00  4	32,55  4	32,55  4	1.800  4.000  5.600	APBD, BANPROV, APBN  APBD, BANPROV, APBN	Dislakan, Dinas Perdagangan Perindustrian,  Dislakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan,
Kegiatan 9 : Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh	Kelompok	8	8	8	8	8	8	8	18.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dislakan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan										Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>															
<b>INDIKATOR : Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu</b>															
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan, Perikanan</b>															
Kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya aisin dan pengendalian hama	Paket	2	4	6	8	10	12 (kumulatif)	12 (kumulatif)	3.600	APPD, BANPROV, APBN	Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Koperasi UMKM,			
Kegiatan 2 : Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya Kegiatan Kaji terap Teknologi Padi Sawah</li> <li>▪ Terlaksananya Kegiatan Kaji Terap Bio Teknologi Bawang Merah</li> <li>▪ Terlaksananya kegiatan Kaji Terap Penggunaan TSS Bawang Merah</li> <li>▪ Terlaksananya Kegiatan Kaji Terap Padi Varietas Baru Padi Sawah</li> <li>▪ Terlaksananya kaji Terap tanaman perkebunan</li> </ul>	Kegiatan	32	32	32	32	32	32	32	3.438	APPD, BANPROV, APBN, FILANTROPI, DUNIA USAHA	Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi			
Kegiatan 3 : Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Telaksananya penangkaran benih/dibit : pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok	2	4	6	8	10	12 (kumulatif)	12 (kumulatif)	3.600	APPD, BANPROV, APBN	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan perikanan			
<b>INDIKATOR : Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan</b>															
<b>PROGRAM 1 : Program Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan</b>															
Kegiatan 1 : Pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Tersusunnya peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	500	APPD, BANPROV, APBN	Barembangda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan			

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Tersedianya bibit tanaman buah-buahan dan toga, intensifikasi Pekarangan , Irigasi tanah dalam dalam mendukung Agrowisata serta kegiatan penunjang	Paket	40	40	40	40	40	40	40	80.000	APBD, BANPROV, APPBN	Dinas Pertanian, Dinas PMD, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi
Kegiatan 3 : Registrasi Penilaian Lahan Usaha/ Kebun	Teregistrasinya lahan usaha/kebun kelompok Terlaksananya Pertemuan TOT	Orang / kelompok	32	32	32	32	32	32	32	3.438	APBD, BANPROV, APPBN, FILANTROPI, DUNIA USAHA	Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi
<b>PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi Lahan</b>												
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Lahan	Pemanfaatan lahan kritis untuk kegiatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Ha	20	30	40	50	60	70 (kumulatif)	70 (kumulatif)	600	APBD, BANPROV, APPBN, F	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan,
Kegiatan 2 : Pencanangan Gerakan Menanam Pohon	Meningkatnya ruang terbuka hijau dan menurunnya luas lahan kritis di wilayah kabupaten Cirebon	Ha	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0 (kumulatif)	7,0 (kumulatif)	900	APBD, BANPROV, APPBN,	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan,
<b>INDIKATOR : Terselurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</b>												
Kegiatan 1 : Penyuluhan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Terlaksananya pelatihan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. 270 gapoktan dan 80 kelompok garam rakyat	Kelompok	4	4	4	4	4	4	4	2.400	APBD, BANPROV, APPBN,	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangani



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 2 : Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Telaksananya bantuan sarana produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui 270 gapoktan dan 80 kelompok garani rakyat	kegiatan	91	91	91	91	91	91	91	91	54.600	APBD, BANPROV, APBN, FILANTROPI, DUNIA USAHA	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi
Kegiatan 3 : Pengembangan Bibit Unggul Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbangunnya Kebun Bibit Datar (KBD) Tebu</li> <li>▪ Terlaksananya Pengembangan Unggas Lokal dan Aneka Ternak</li> <li>▪ Terlaksananya Pengembangan Ternak Ruminansia</li> <li>▪ Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan</li> <li>▪ Terlaksananya temu lapang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</li> <li>▪ Terlaksananya temu teknis Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</li> </ul>	Paket	40	40	40	40	40	40	40	40	80.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi
Kegiatan 4 : Penunjang Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan kegiatan pengembangan tebu rakyat</li> <li>▪ Terlaksananya pendampingan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</li> </ul>	kegiatan	91	91	91	91	91	91	91	91	5.460	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas Ketahanan Pangan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 5 : Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Tersedianya sarana produksi Pertanian, Perkebunan, Sarana pembibitan ternak, Peternakan dan Perikanan. kegiatan	91	91	91	91	91	91	91	54.600	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis,	
Kegiatan 6 : Peningkatan Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Tersedianya sarana Infrastruktur yang memadai kegiatan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Paket	40	40	40	40	40	40	40	80.000	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUUR,	
Kegiatan 7 : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Tertelaksananya pelatihan Inseminasi buatan Paket	40	40	40	40	40	40	40	80.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan,	
<b>TUJUAN : KEHIDUPAN SEHAT DAN SELAJHTERA</b>												
<b>INDIKATOR : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>												
Kegiatan 1 : Meningkatkan akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer rawat jalan, rawat inap dan pelayanan kesehatan khusus	Meningkat nya kualitas kesehatan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan K4</li> <li>▪ Cakupan KN Lengkap</li> <li>▪ Cakupan Kunjungan Bayi .</li> <li>▪ Cakupan Kunjungan Balita</li> <li>▪ Presentasi Kasus Gizi Buruk yang di Tangani</li> </ul> Orang	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	23.976	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
Kegiatan 2 : Intervensi gizi dan kesehatan	1. Terselenggaranya pelatihan manajemen program gizi di puskesmas bagi pimpinan dan petugas puskesmas dan jaringannya	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	2. Tersedianya biaya operasional bagi Puskesmas untuk pembinaan Posyandu, pelacakan kasus, kerjasama Pekerja Sosial Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	3. Terpenuhnya kebutuhan sarana antropometri dan KIE bagi Puskesmas dan jaringannya	Orang	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	82.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA
	4. Pelatihan tatapaksana gizi buruk bagi petugas Puskesmas perawatan maupun Kader Posyandu	Puskesmas dan Pustu	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
5. Tersusunya pedoman Promosi keluarga sadar gizi (KADARZI)	Puskesmas dan Pustu	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
Kegiatan 3 : Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Puskesmas dan Pustu	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terselenggaranya istem pelaporan, diseminasi, informasi dan pemanfaatannya</li> <li>▪ Tersedianya data gizi secara reguler (pemantauan status gizi, untuk semua kelompok</li> </ul>											

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
	umur, pemantauan konsumsi gizi, kelaparan dan kurang gizi, khususnya gizi buruk pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten												
<b>INDIKATOR : Unmet need pelayanan kesehatan</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>													
Kegiatan 1 : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Meningkatnya jumlah petugas diim peningkatan mutu pel kesehatan dasar (pengobatan rasional, pel. Kes gigi, pel laboratorium, labkesda dan pel kegawat-daruratan Puskesmas	Puskesmas dan Pustu	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah pos kesehatan lebaran, natal dan tahun baru terbentuk dan P3K, Pelayanan P3K, Peningkatan kemampuan teknis petugas dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan bencana.	Puskesmas, Pustu, Poskesdes	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 3 : Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan	Puskesmas, Pustu, UPT	132	132	132	132	132	132	132	132	13.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 4 : Pelayanan Operasi Katarak	Jml Penderita katarak yang ditemukan (penjaringan kasus) dari keluarga miskin dapat dilakukan operasi	Orang	332	266	212	170	136	109	80	3.320	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Kesehatan, RSUD Waled, RSUD Arjawinangun
Kegiatan 5 : Pelayanan Kesehatan Pengembangan/ Khusus	Jumlah petugas Puskesmas yang mampu melaksanakan upaya kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan indera, kesehatan komunitas, kesorga, dan kesehatan tradisional	puskesmas	57	60	60	60	60	60	60	4.104	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Kesehatan, Filantropi, Dunia Usaha
Kegiatan 6 : Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktek perorangan 100%	Orang	128	134	141	148	156	163	170	3.300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 7 : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas	Terselenggaranya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Puskesmas	57	60	60	60	60	60	60	342.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 8 : Penilaian Kinerja Puskesmas	Meningkatnya cakupan puskesmas dengan kinerja baik	Puskesmas	34	40	46	51	57	60	60	180.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 9 : Akrreditasi Sarana Kesehatan Swasta	Terakreditasinya sarana kesehatan swasta	Puskesmas	15	16	17	18	19	20	21	90.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON											
4. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	Orang	45.722	46.107	46.582	47.058	47.533	47.533	47.533	16.832	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
5. Persentase pelaksanaan surveilans gizi	Kepala Keluarga	4.366	4.148	3.940	3.743	3.556	3.378	3.378	2.213	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan
6. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana	Bayi (100%)	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	579	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial,
7. Jumlah (persentase) Puskesmas dengan tenaga terlatih Tataleaksana Anak Gizi Buruk	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
8. Jumlah (persentase) RSUD dengan tenaga terlatih Tataleaksana Anak Gizi Buruk	RSUD	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, RSUD Waled, RSUD Arjawinangun
9. Persentase balita ditim bang di Posyandu (D/S)	Anak	45.702	46.173	46.644	47.115 (100%)	47.115 (100%)	47.115 (100%)	47.115 (100%)	600	APBD, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas PMD
10. Persentase Puskesmas memiliki tenaga terlatih pemantauan pertumbuhan	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Filantropi
11. Persentase Pembinaan kader di Posyandu	Posyandu	2.533	2.558 (100%)	2.558 (100%)	2.558 (100%)	2.558 (100%)	2.558 (100%)	2.558 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas PMD
12. Persentase Puskesmas memiliki konselor menyusui	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 2 : Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	13. Persentase Puskesmas membina kelompok pendukung ASI	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
	Kegiatan 2 : Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Persentase ibu hamil mendapat tablet Fe 90 table	orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
		2. Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
		3. Persentase bayi 6-12 bulan dan anak 1-5 tahun mendapat kapsul vitamin	Orang	196.488	231.162 (100%)	231.162 (100%)	231.162 (100%)	231.162 (100%)	231.162 (100%)	231.162 (100%)	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
		4. Persentase Kunjungan Ibu Hamil ke-4 (K4)	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	5. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	Orang	152	152	152	152	152	152	152	912	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, RSUD Waled dan Ariawinangun	
<b>PROGRAM 3 : Aksesibilitas Pangan</b>													
Kegiatan 1 : Pengembangan Ketersediaan Pangan	1. Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan	desa	9	12	14	16	18	20 (kumulatif)	20 (kumulatif)		APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD,	

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	2. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan	unit	2	3	4	5	6	7 (kumulatif)	7 (kumulatif)	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD
	3. Penanganan daerah rawan pangan	Kepala Keluarga	4.366	4.148	3.940	3.743	3.556	3.378	3.378	11.566	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian
	4. Ketersediaan data rawan pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1.500	APBD, BANPROV, APBN	Barentlitbangda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
	5. Pemantauan dan pemertanian ketersediaan dan kerawanan pangan (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
	1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di daerah produsen pangan	unit	2	3	4	5	6	7 (kumulatif)	7 (kumulatif)	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD
2. Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
3. Terlaksananya pemantauan dan pemertanian distribusi, harga dan akses pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>INDIKATOR : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>													
Kegiatan 1 : Penyusunan Necara bahan bahan makanan	Tersusunnya Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
Kegiatan 2 : Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	Tersusunnya dokumen alur distribusi hasil produksi dan tata niaga hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
Kegiatan 3 : Bantuan bahan makanan pokok bagi keluarga terancam rawan pangan ektrim	Tersalurkannya bantuan bahan makanan pokok bagi keluarga terancam rawan pangan ektrim di luar keluarga penerima raskin/BPNT	Kepala Keluarga	4.366	4.148	3.940	3.743	3.556	3.378	3.378	3.378	11.566	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial,
<b>INDIKATOR : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>													
Kegiatan 1 : Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bantuan bahan makanan pokok bagi keluarga terancam rawan pangan ektrim	Kepala Keluarga	4.366	4.148	3.940	3.743	3.556	3.378	3.378	3.378	11.566	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial,
<b>INDIKATOR : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>													
Kegiatan 1 : Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan	Kelas (kegiatan)	91	91	91	91	91	91	91	91	1.200	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pertanian,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kegiatan Kecamatan	91	91	91	91	91	91	91	91	1.200	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pertanian, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi
		40	40	40	40	40	40	40	40	16.000	APBD, BANPROV, APBN, DUNIA USAHA	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dunia Usaha,
Kegiatan 3 : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kegiatan	32	32	32	32	32	32	32	32	3.438	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan,
INDIKATOR : Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam												
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Ketahanan Pangan												
PROGRAM 2 : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan												
Kegiatan 1 : Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan yang akan Dipasarkan	Terlaksananya pelatihan teknis kemas terlaksananya pelatihan teknis kemas	91	91	91	91	91	91	91	91	1.200	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		kegiatan	91	91	91	91	91	91	91	91		



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
Kegiatan 10 : Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, Puskesmas	34	40	46	51	60	60	60	180.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Filantropi, Dunia Usaha
INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita											
INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta											
INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil											
INDIKATOR : Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita											
PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Balita kurus yang mendapat makanan	Orang	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	47.936	23.976	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	2. Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	3. Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah(TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	4. Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	5. Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Puskesmas dan Pustu	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	128 (100%)	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>INDIKATOR : Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>													
Kegiatan 1 : Pengembangan Pengenerkagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
	2. Pengembangan Pangan Lokal	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dislakan
<b>PROGRAM 2 : Program Mutu Dan Keamanan Pangan</b>													
Kegiatan 1 : Pengawasan Obat dan Makanan	1. Proporsi makanan yang memenuhi syarat	Kepala Keluarga	4.366	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	2.616	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	1. Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
Kegiatan 3 : Inspeksi dan Sertifikasi Makanan	1. Persentase sarana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini 2. Persentase sarana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,





Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 6 : Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah	1. Jumlah Kantin Sekolah yang Dilatih dan Difasilitasi Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan di Kantin Sekolah 2. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Bimtek pada Kantin Sekolah	Sekolah (SD, MI, SMP, MTs)	343	412	480	549	617	686	700	3.000	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM 3 : Kelembagaan Pangan Dan Gizi</b>												
Kegiatan 1 : Eningkatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	1. Jumlah tenaga kesehatan gizi di puskesmas 2. Jumlah kecamatan yang mempunyai tenaga PPL pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi	Puskesmas dan pusat Kecamatan	128	128	128	128	128	128	128	2.565 16.000	APBD, BANPROV, APBN APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,, Dinas Ketahanan Pangan,
<b>PROGRAM 4 : Pendirian dan pengelolaan Rumah Gizi</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi Gizi bagi remaja putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang.	Peningkatan pengetahuan bagi remaja putri, ibu hamil dan keluarga, ibu dengan balita dan keluarga, ibu dengan anak stunting, anak gizi buruk, anak kurang gizi dan keluarga tentang gizi dan keutamaannya	Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN, APBDes	Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa
Kegiatan 2 : Konseling Gizi dan Koseling Menyusui bagi masyarakat	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif	orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN, APBDes	Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih												
INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih												
INDIKATOR : Angka Kematian Ibu (AKI)												
INDIKATOR : Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup												
INDIKATOR : Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup												
INDIKATOR : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup												
PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, PKK, Filantropi, Dunia Usaha
		Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, PKK, Filantropi, Dunia Usaha
			1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861		
Kegiatan 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga	1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, PKK, Filantropi, Dunia Usaha
		Orang	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, PKK, Filantropi, Dunia Usaha
			1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861		
Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	1. Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	Puskesmas dan buku	128	128	128	128	128	128	128	2.565	APBD, APBN	Dinas Kesehatan, Filantropi
		Puskesmas dan buku	128	128	128	128	128	128	128	2.565	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Filantropi
			3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (PAK)	128	128	128	128	128	128	128		
Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	1. Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	Puskesmas	57 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
		Kecamatan	40	40	40	40	40	40	40	40	16.000	APBD, BANPROV, APBN,
2. Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil	Kecamatan		40	40	40	40	40	40	40	40	16.000	APBD, BANPROV, APBN,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 4: Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Kecamatan	1. Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi	40	40	40	40	40	40	40	16.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Kesehatan,
		2. Kabupaten memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Unit	2	2	2	2	2	2	2	300	APBD, BANPROV, APBN
<b>PROGRAM 2 : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>												
Kegiatan 1:		burnil resti dan komplikasi dapat ditangani, 424										
Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan Bayi	Puskesmas	bidan dpt mendeteksi sesuai SOP, PKM PONED mampu memberikan pelayanan sesuai SOP, 10 PKM fokus PKRT	57 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Filantropi
Kegiatan 2:												
Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Puskesmas dan pustu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Neonatal</li> <li>▪ Penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan</li> </ul>	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 3:												
Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Puskesmas dan pustu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Neonatal,</li> <li>▪ Penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan</li> <li>▪ 2 RS swasta dan 6 Pusk PONED 5 Pusk PONED</li> </ul>	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 4 :												
Jaminan Persalinan	Jiwa	Jumlah masyarakat (pasien persalinan dan keluarga pasien) yang menerima bantuan jaminan persalinan	213.645	213.645	213.645	213.645	213.645	213.645	213.645	640.935	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
<b>PROGRAM 3 : Sosialisasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pemenuhan gizi Keluarga</b>											
Kegiatan 1: Sosialisasi kesehatan Reproduksi dan gizi bagi remaja putri dan ibu hamil	Orang	120	120	120	120	120	120	120	6.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2: Pendampingan layanan Kesehatan Reproduksi dan pemenuhan gizi keluarga bagi ibu hamil	Orang	300	300	300	300	300	300	300	6.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
<b>INDIKATOR : Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV</b>											
<b>INDIKATOR : Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>											
<b>PROGRAM 1 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>											
Kegiatan 1 : Penanggulangan HIV/AIDS	Bertambahnya fasilitas dan layanan HIV/AIDS,	Puskesmas 57 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Orang dengan HIV-AIDS	Bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap HIV/AIDS	Puskesmas 60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
INDIKATOR : Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk											
INDIKATOR : Kejadian Malaria per 1000 orang											
INDIKATOR : Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk											
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B											
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B											
INDIKATOR : Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria											
INDIKATOR : Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati											
INDIKATOR : Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis											
INDIKATOR : Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%											
INDIKATOR : Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara											
<b>PROGRAM 1 : Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</b>											
<b>Kegiatan 1 :</b>											
Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra											
1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Orang	214.981	217.292	219.604	224.227	226.539	228.850	228.850	27.394	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
2. Persentase anak usia dibawah tiga tahun yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan imunisasi	Orang	161.813	173.372	184.930	196.488	208.046	219.604	219.604	27.394	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	Orang	214.981	217.292	219.604	224.227	226.539	228.850	228.850	27.394	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
4. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons	Orang	214.981	217.292	219.604	224.227	226.539	228.850	228.850	27.394	APBD, APBN BANPROV	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
5. Penemuan kasus discarded campak $\geq 2$ per 100.000 penduduk	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	34.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
6. Penemuan kasus AFP non polio $\geq 2$ per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	34.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
7. Persentase melaksanakan upaya kesehatan mitra sebesar 60%	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	34.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
8. Persentase Kabupaten yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	34.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
9. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	34.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
10. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	34.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang											
1. Persentase pengendalian vektor terpadu sebesar 80%.	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	17.100	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
2. Jumlah API <1/1.000 penduduk	Puskesmas	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	17.100	APBD, APBN	Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
3. Jumlah endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikro filarial menjadi < 1% sebanyak 75 kabupaten	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
4. Persentase IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 68%	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
5. Persentase eliminasi rabies sebesar 85%	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
6. Persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber binatang	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
7. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit bersumber binatang	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
Kegiatan 3 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95%.	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
	2. Jumlah mencapai eliminasi kusta. Dengan target di tahun 2020, eliminasi kusta	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
	3. Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% sebesar 90%	Orang	1.784	1.475	1.386	1.296	1.207	1.118	1.118	8.920	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 4 : Penyehatan Lingkungan	4. Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55%	Orang	129	97	73	54	41	31	31	1.290	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan	
	5. Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 60%	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
	6. Persentase melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko sebesar 80%	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
	7. Persentase kajian pengendalian penyakit menular langsung	Dokumen / Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
	8. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit menular langsung	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
	1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
	2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
	3. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
4. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 36%	RSUD	2	2	2	2	2	2	2	2	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup,	
5. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Puskesmas dan pustu	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup	
6. Jumlah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 386 desa/keurahan	Desa	260	272	283	295	306	318	318	318	1.734	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup	
7. Persentase rekomendasi kajian penyehatan lingkungan	Dokumen Rekomendasi	150	200	250	300	350	400	400	400	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup	
8. Persentase teknologi tepat guna penyehatan lingkungan	Desa	260	272	283	295	306	318	318	318	1.734	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup	
9. Persentase penerbitan sertifikat/hasil uji pemeriksaan laboratorium dan kalibrasi	Dokumen Rekomendasi	150	200	250	300	350	400	400	400	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup	
<b>PROGRAM 2 : Program penanggulangan penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara melalui Iva test dan sadarnis</b>													
<b>Kegiatan 1:</b>													
Sosialisasi kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini Iva test dan sadarnis pada PUS	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PUS tentang penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini Iva test dan sadarnis	orang	600	600	600	600	600	600	600	600	18.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Pendampingan dan pelayanan pemeriksaan deteksi dini IVA test dan sadarnis bagi PUS	Jumlah PUS yang sudah melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA test dan sadarnis  orang	200	200	200	200	200	200	200	12.000.000	APBD, BANPROV, APBN, dan Kemitraan	Diras Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah Cirebon	
<b>INDIKATOR : Prevalensi tekanan darah tinggi</b>												
<b>INDIKATOR : Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)</b>												
Kegiatan 1 : Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)	Tersedianya data/informasi hasil ukur faktor resiko PTM di Posbindu PTM	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Kesehatan,
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu  2. Persentase melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)  3. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM  4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Kesehatan,
		Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Kesehatan,
		Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Kesehatan,
		Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
5. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
6. Persentase kajian pengendalian penyakit tidak menular	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
7. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit tidak menular	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
<b>INDIKATOR : Angka Kematian Dari Percobaan Bunuh Diri</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa</b>												
<b>PROGRAM 1 : Pencegahan Percobaan Bunuh Diri Pada Anak Dan Remaja Dengan Depresi</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masy. dan Lembaga Keagamaan	Tercapainya pencegahan tindakan bunuh diri	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Depag, Dinas Sosial, Desa/kelurahan,
Kegiatan 2 : Peningkatan Peran Satuan Pendidikan Keagamaan Non Formal	Tercapainya pencegahan tindakan bunuh diri	Lembaga	25	25	25	25	25	25	25	750	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Depag, Dinas Pendidikan, Desa/kelurahan,
<b>INDIKATOR : Prevalensi penyalahgunaan narkoba</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah penyalahgunaan narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan</b>												
<b>INDIKATOR : Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir</b>												



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>														
INDIKATOR : Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
INDIKATOR : Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
<b>PROGRAM 1 : Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>														
Kegiatan 1 : Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza		1. Pelayanan Sosial oleh tim untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Lembaga	25	25	25	25	25	25	25	25	750	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
Kegiatan 2 : Bimbingan Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA		1. Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah mempunyai ketrampilan 2. Bertambahnya eks korban NAPZA yang memiliki KUBE	Lembaga	25	25	25	25	25	25	25	25	750	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Depag, Dinas Sosial,
<b>PROGRAM 2 : Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>														
Kegiatan 1 : Pencegahan, Pemberrantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		Meningkatnya peran pemuda dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disbudparpora
Kegiatan 2 : Sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna		Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP dan SMA dan masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba dan dampakya bagi masa depan pengguna	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	6.000.000	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disbudparpora

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Cedera Fatal Kecelakaan Lalu Lintas												
INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan Nasional												
INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan												
PROGRAM 1 : Penguatan Konektivitas Regional												
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan	Panjang jalan yang terpelihara Km	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	3.000	APBD, APBN, BANPROV, BANPUBN	Dinas PUPR
PROGRAM 1 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan												
Kegiatan 1 : Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Dokumen	1	1	-	1	-	-	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 2 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin dan Periodik Km	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 3 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jembatan Kabupaten yang terpelihara buah	65	65	65	65	65	65	61	61	3.860	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
PROGRAM 2 : Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan												
Kegiatan 1 : Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Dokumen	1	-	1	1	-	-	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin dan Periodik Km	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	534,97	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR	
Kegiatan 3 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jembatan Kabupaten yang terpelihara buah	65	65	65	65	65	65	61	61	3.860	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
<b>PROGRAM 3 : Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>												
Kegiatan 1 : Pemanfaatan Jalan	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang Dipergunakan Masyarakat dan Jumlah Patok Km/Hm yang Terpasang	1	-	1	1	1	1	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
<b>Program 4 : Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan</b>												
Kegiatan 1 : Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan	Tersusunnya Informasi Database Jalan	1	1	-	-	1	-	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 2 : Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jembatan	Tersusunnya Informasi Database Jembatan	1	1	-	1	-	-	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
<b>PROGRAM 2 : Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>												
Kegiatan 1 : Pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) baru dan yang rusak berat menjadi lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan	1 PKM	1 Pustu	1 Pustu	-	-	-	-	-	9.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 2 : Pengadaan Puskesmas Keliling	Tersedianya Kendaraan Puskesmas Keliling untuk Puskesmas	Pusling	-	-	1	1	-	-	-	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,	
Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Cirebon	Puskesmas	57	60	60	60	60	60	60	57.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 4 : Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap	Bertambahnya Jumlah Puskesmas rawat inap	Puskesmas	5	6	7	8	9	10	10	5.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 5 : Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Tersedianya perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan	Pustu	9	9	9	9	9	9	9	9.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 6 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas	Terbangunnya sarana dan prasarana fisik puskesmas serta IPAL yang lebih memadai dan memenuhi syarat kesehatan	Unit (IPAL)	8	16	20	24	28	32		64.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kimrumtan,	
Kegiatan 7 : Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Tersedianya perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas) yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan	Puskesmas dan pustu	128	128	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
Kegiatan 8 : Pengembangan Labkesda dan Labkesling	Unit	2	3	4	5	6	7	14.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya Perbaikan Bangunan UPT Labkesda &amp; Labkesling agar lebih baik dan memenuhi syarat</li> <li>▪ Akreditasi Labkesda dan Labkesling</li> </ul>											
<b>PROGRAM 3 : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut</b>											
Kegiatan 1 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	128	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPJS,
<b>INDIKATOR : Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk</b>											
<b>INDIKATOR : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</b>											
<b>PROGRAM 1 : Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</b>											
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Puskesmas	Terlayannya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Peserta JKN pada FKTP Puskesmas atau yang setara, Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Klinik pratama atau yang setara, Rumah Sakit kelas D Pratama atau yang setara	Puskesmas dan pusat	128	128	128	128	128	120	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPJS,
<b>INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Air Tidak Aman, Sanitasi Tidak Aman, Dan Tidak Higienis</b>											
<b>INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Keracunan</b>											
<b>PROGRAM 1 : Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>											
Kegiatan 1 : Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan	Meningkatnya cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Pengawasan dan Pembinaan Tempat- tempat Umum	Meningkatnya cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Trantib, Dunia Usaha, Filantropi
Kegiatan 3 : Pengawasan dan Pembinaan Industri	Meningkatnya cakupan industri yang memenuhi syarat kesehatan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP
Kegiatan 4 : Pengawasan Obat (distribusi dan penggunaan)	Peningkatan pengetahuan peraturan mengenai distribusi obat (CDOB = Cara Distribusi Obat yang Baik) di Apotek dan Toko Obat	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan,
Kegiatan 5 : Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan hygiene sanitasi bagi pengelola makanan dan minuman	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	
<b>PROGRAM 1 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>												
Kegiatan 1 : Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersusunnya konsep Pengembangan Lingkungan Sehat di Kabupaten Cirebon	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Klinik Sanitasi	Penurunan penyakit berbasis lingkungan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 3 : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat at Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Runkintan
<b>INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk umur <math>\geq 15</math> tahun</b>												
<b>INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk umur <math>\leq 18</math> tahun</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>												
Kegiatan 1 : Pengenangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Adanya peningkatan cakupan rumah tangga ber PHBS	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN APBDes	Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa
Kegiatan 2 : Pengembangan Kabupaten Sehat	~ Adanya 9 kawasan sehat ~ Pembinaan Program Cirebon Kabupaten Sehat"	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda
<b>PROGRAM 1 : PembinaanLingkungan Sosial</b>												
Peningkatan Derajat Kesehatan Masy. Dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Cakupan RT tdk merokok di/m ruangan	Keluarga	235.927	283.112	330.298	377.483	424.669	471.854		3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
<b>INDIKATOR : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas</b>												
<b>PROGRAM 1 : Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Puskesmas dan pustu	128	128	128	128	128	128	128	60.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPJS,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024		
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 2 : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhi nya obat esensial, obat generik dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Puskesmas dan buku	128	128	128	128	128	128	128	128	60.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan,
Kegiatan 3 : Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian yang bermutu baik, Penulisan resep Obat generik di puskesmas, Harmonisasi lintas program dalam pengelolaan obat	Puskesmas dan buku	128	128	128	128	128	128	128	128	60.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPS,
Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana Rantai Vaksin	Tersedianya sarana rantai vaksin di puskesmas dan dinas kesehatan sesuai standar	Puskesmas dan buku	128	128	128	128	128	128	128	128	60.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPS,
<b>INDIKATOR : Angka pemakalan kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin</b>													
<b>INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi</b>													
<b>INDIKATOR : Proporsi pasangan usia subur (umur 15- 49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)</b>													
Kegiatan 1 : Bintek dan Seminar Pengarusutamaan Gender	Meningkatk an kesempatan dan daya saing ketenagaker jaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, DPPKBPPPA, Filantropi
Kegiatan 2 : Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Terwujudn ya masyarakat yang berbudaya, berketram pilan dan berjiwa kewirausa haan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, DPPKBPPPA,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 3 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Korban yang terlayani, jejaring gugus tugas yang terfasilitasi, masyarakat tersosialisasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA,
Kegiatan 4 : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga / Organisasi yang mendukung Kesetaraan Gender	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, DPPKBPPPA, Filantropi
Kegiatan 5 : Evaluasi Pelaksanaan PUG		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, DPPKBPPPA,
Kegiatan 6 : Sosialisasi dan Pembinaan Fungsi KLA dan Forum Anak Daerah	Bertambahnya jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi, bertambahnya Forum Anak	Kelompok	2	4	6	8	10	12 (kumulatif)			1.200	APBD, BANPROV, APBN	Setda, DPPKBPPPA
<b>INDIKATOR : Ummet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Kampung Keluarga Berencana (KB)</b>													
<b>PROGRAM 2 : Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b>													
Kegiatan 1 : Fasilitasi Pembentukan Kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian penduduk</li> <li>Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas</li> <li>Terwujudnya desa pelopor KB di setiap kecamatan</li> </ul>	Desa	260	272	283	295	306	318	328		1.734	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Fasilitasi Pembentukan Kel. Masy. Peduli KB	Tertaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Paripurna Setiap Kecamatan	Desa	260	272	283	295	306	318	328	1.734	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
<b>PROGRAM 3 : Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga</b>												
Kegiatan 1: Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	1. Peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)	orang	354.676 (100%)	354.676 (100%)	354.676 (100%)	354.676 (100%)	354.676 (100%)	354.676 (100%)	354.676 (100%)	53.201	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
	2. Faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai standar pelayanan	Puskesmas dan pusat pelayanan	128	128	128	128	128	128	128	60.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, Filantropi
Kegiatan 2: Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kes. pelayanan	1. Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	Orang	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	35.909	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial,
Kegiatan 3: Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/ PA)	Orang	83.963 (100%)	83.963 (100%)	83.963 (100%)	83.963 (100%)	83.963 (100%)	83.963 (100%)	83.963 (100%)	12.594	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program	1. PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPk melalui	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>															
Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)														
	2. PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
Kegiatan 5 : Pelayanan KIE	Jumlah Motivator KIE KB	Orang	1.059	1.332	1.665	1.959	2.176	2.291	2.356	10.482	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PPKBPPPA			
Kegiatan 6 : Sosialisasi (KHIBA) Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak	Pemahaman Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
Kegiatan 7 : Sosialisasi/ Orientasi dan Pengembangan Kel. Pusat Informasi Komunikasi (PIK) Remaja	Pemahaman Informasi Komunikasi (PIK) Remaja	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
Kegiatan 8 : Pelayanan KB Sosialisasi/Orientasi Konsepsi Kontrasepsi (KIP/K) bagi Pengelola Program KB	Pemahaman Kontrasepsi (KIP/K) bagi Pengelola Program KB	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 9 : Sosialisasi/Orientasi Peningkatan Pelindungan dan Hak- Hak Reproduksi Individu	Pemahaman Pelindungan dan Hak-Hak Reproduksi Individu	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,	
Kegiatan 10 : Akrreditasi Penyuluh Keluarga Berencana	Umpan balik hasil penilaian akreditasi PKB	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,	
<b>INDIKATOR : Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Pelayanan Kontrasepsi</b>													
Kegiatan 1 : Pelayanan KB Medis Operasi	Peserta KB yang dilayani	Orang	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	35.909	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
Kegiatan 2 : Pelayanan KB Melalui Mobil Unit Pelayanan (Moyan)	Peserta KB yang dilayani	Orang	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	35.909	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
Kegiatan 3 : Pelayanan KIE Melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen)	Peserta KB yang dilayani	Orang	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	239.399 (100%)	35.909	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA Dinas Kesehatan,
<b>INDIKATOR : Proporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman</b>													
<b>INDIKATOR : Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan Dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku</b>													
<b>INDIKATOR : Proporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air Dan Sabun</b>													



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>INDIKATOR : Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air</b>													
<b>INDIKATOR : Jumlah Terbangun Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan Dan Komunal</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>													
Kegiatan 1 : Penyediaan Prasarana Sarana Air Minum bagi Masyarakat Ber-penghasilan Rendah	Terpenuhnya kebutuhan air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, PDAM, Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Limbah	Unit	5	10	15	20	25	30 (kumulatif)	30 (kumulatif)	360.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,	
Kegiatan 3 : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya sarana dan prasarana air minum	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	48 (kumulatif)	138.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, Pemerintah Desa	
Kegiatan 4 : Pembangunan Sanitasi	Terbangunnya Sarana Sanitasi di Kabupaten Cirebon	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	48 (kumulatif)	21.000	APBD, BANPROV, APBN APBDes	Diskrimntan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, Pemerintah Desa	
<b>PROGRAM 2 : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>													
Kegiatan 1 : Perencanaan pengembangan infrastruktur	Adanya Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Permukiman di Bidang Infrastruktur	dkumen	1	-	1	-	-	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN	Baretitbangda, Dinas PUPR, Diskrimntan	
Kegiatan 2 : Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bangunan dan Gedung Pelayanan Masyarakat di Kab Cirebon	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	56	9.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas Kesehatan Pemerintah Desa	
<b>PROGRAM 3 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>													

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 1 : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Terpenuhinya Lingkungan yang Sehat Bagi Masyarakat Perdesaan	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	56	9.000	APBD, BANPROV, APBN	Diskrimntan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Terpenuhinya Lingkungan yang Sehat Bagi Masyarakat Perdesaan	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	56	9.000	APBD, BANPROV, APBN APBDes	Diskrimntan, Dinas Kesehatan Pemerintah Desa
<b>INDIKATOR : Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</b>												
<b>PROGRAM 1 : Bidang Kesehatan</b>												
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyakit Lingkungan/ Penyahan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	56	9.000	APBD, BANPROV, APBN APBDDesa	Diskrimntan, Dinas Kesehatan Pemerintah Desa
	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	56	9.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas LH, Dinkes
	Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	Desa	8	16	24	32	40	48 (kumulatif)	56	9.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
<b>TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>												
<b>INDIKATOR : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika</b>												
<b>PROGRAM 1 : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan</b>												
Kegiatan 1 : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan	Siswa SD yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	Orang	40	40	40	40	40	40	40	47.816	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 2 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sekolah	923	923	923	923	923	923	923	923	83.070	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
INDIKATOR : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B												
PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI												
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI	Pemetaan Kompetensi Kinerja Kepala SD/MI Meningkatkan Kompetensi Kinerja Kepala SD/MI	sekolah	40	40	40	40	40	40	40	48.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI	Pembangunan perpustakaan sekolah	sekolah	25	25	25	25	25	25	25	225.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
INDIKATOR : Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B												
PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs												
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs	Pemetaan Kompetensi Kinerja Kepala SMP/MTs Meningkatkan Kompetensi Kinerja Kepala SMP/MTs	sekolah	25	25	25	25	25	25	25	18.750	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan, Akademis
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs	Pembangunan perpustakaan sekolah	sekolah	25	25	25	25	25	25	25	187.500	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum	sekolah	25	25	25	25	25	25	25	225.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	sekolah	25	25	25	25	25	25	25	281.250	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>														
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	sekolah	25	25	25	25	25	25	25	25	150.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,	
<b>INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat</b>														
<b>INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SM P/MTs/ sederajat</b>														
<b>INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat</b>														
<b>PROGRAM 1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun</b>														
Kegiatan 1 :	Rasionalisasi angka rasio murid sekolah melalui penambahan guru	Tercapainya rasio perbandingan siswa dan guru melalui penerimaan guru baru SD/MI	orang	80	80	80	80	80	80	80	17.280	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 2 :	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Tersedianya buku teks pelajaran dan Buku Laporan Pendidikan	Sekolah	80	80	80	80	80	80	80	38.400	APBD, APBN, BANPROV,	Dinas Pendidikan,	
Kegiatan 3 :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktikum dan peraga siswa sebagai penunjang kelancaran KBM	Sekolah	80	80	80	80	80	80	80	96.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,	
<b>INDIKATOR : Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun</b>														
<b>INDIKATOR : Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b>														
<b>PROGRAM 1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun</b>														
Kegiatan 1 :	Penyelenggaraan dan Pembinaan SMP Terbuka	Tercapainya pembelajaran lancar dan sukses di SMP Terbuka	Paket per kecamatan	7	7	7	7	7	6	6	7	26.250	APBD, BANPROV, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Pendidikan, Filantropi, Ormas, Dunia Usaha, Akademis



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>											
Kegiatan 2 : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	Tercapai pembelajaran Paket B sesuai dengan Petunjuk Teknis orang	14	14	14	14	12	12	12	5.880	APBD, APBN, BANPROV, BANPBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 3 : Pengembangan Pendidikan kecakapan Hidup	Mendorong terciptanya jiwa kewirausahaan untuk Mengakses Peluang Tenaga Kerja orang	80	80	80	80	80	80	80	600	APBD, APBN, BANPROV, BANPBN	Dinas Pendidikan, Disnakertrans,
<b>INDIKATOR : Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin</b>											
<b>INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>											
<b>PROGRAM 1 : Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>											
Kegiatan 1 : Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru PAUD	Kegiatan/kecamatan	2	2	2	2	2	2	12.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 2 : Pembangunan sarana bermain	Tersedianya alat permainan edukatif untuk PAUD	Kegiatan/kecamatan	2	2	2	2	2	2	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 3 : Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terbangunnya pagar pengaman sekolah	Kegiatan/kecamatan	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 4 : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas TK/PAUD	Kegiatan/kecamatan	2	2	2	2	2	2	2.400	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 5 : Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. 80 Lembaga PAUD dan 16 TK Negeri	PAUD dan TK Negeri	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 6 : Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Meningkatnya Mutu Layanan PAUD dan Kesejahteraan PTK Negeri	PAUD dan TK Negeri	96	96	96	96	96	96	96	96	9.600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
<b>PROGRAM 2 : Program Pengembangan Kurikulum PAUD</b>													
Kegiatan 1 : Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Birek Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	PAUD dan TK Negeri	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 2 : Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Tersedianya buku teks dan buku Laporan Pendidikan	PAUD dan TK Negeri	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 3 : Pengembangan pendidikan anak usia dini	Dilaksanakannya a Lomba Kreatifitas Peserta Didik	PAUD dan TK Negeri	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 4 : Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Sosialisasi Teori Pembelajaran bagi Guru PAUD yang bukan berkualifikasi Ke-PAUD- an.	PAUD dan TK Negeri	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
INDIKATOR : Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin													
INDIKATOR : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun													
INDIKATOR : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun													
INDIKATOR : Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)													
<b>PROGRAM 1 : Program Pendidikan Non Formal</b>													
Kegiatan 1 : Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Peserta Lomba Keteladanan dan Apresiasi	Lembaga Pendidikan dan Ketarampilan (Kursus)	40	40	40	40	40	40	40	40	6.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 2 : Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Program Pembelajaran LKP sesuai dengan Petunjuk Teknis	Orang	80	80	80	80	80	80	80	80	1.440	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 3 : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Meningkatnya Kompetensi dalam menyusun Kurikulum Pembelajaran KF	Lembaga pendidikan	7	7	7	7	6	6	6	6	1.500	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 4 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	Penerapan pembelajaran mengenal dan menguasai baca Al - Quran	kecamatan	40	40	40	40	40	40	40	40	6.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 5 : Peningkatan Pengembangan Pendidikan Non Formal	Peserta Sosialisasi Tutor Keaksaraan Fungsional	orang	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Filantropi, Akademis

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kegiatan 6 : Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Meningkatnya pencitraan publik melalui lomba-lomba pendidik dan peserta didik kursus	orang	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,
<b>PROGRAM 2 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun</b>													
Kegiatan 1 : Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Sebanyak 6.000 WB mendapat Pembelajaran Keaksaraan Fungsional (KF)	Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	1.500	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,
Kegiatan 2 : Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarakat	Berkembangnya Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarakat	Kecamatan	40	40	40	40	40	40	40	40	3.600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,
Kegiatan 3 : Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	Tercapainya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 7 Orang Guru Kontrak Daerah (guru kontrak daerah)	Orang	7	17	21	28	35	42	42	42	3.600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,
Kegiatan 4 : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- Islam setara SD dan SMP	1. Sosialisasi BOS  2. Bimtek Pendataan dan Pelaporan BOS  3. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana BOS	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,
		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,
		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Diras Pendidikan,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
4. Operasional Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten Cirebon	orang	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan,
	5. Penyediaan Honorarium PTK Non PNS pada SD dan SMP	orang	96	96	96	96	96	96	96	96	4.800	APBD, BANPROV, APBN
<b>INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)</b>												
<b>PROGRAM 1 : Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>												
Kegiatan 1 : Pembangunan Gedung Sekolah Baru	Terbangunnya gedung sekolah baru di wilayah-wilayah yang kekurangan termasuk kegiatan penggabungan (regrouping) sekolah menjadi sekolah yang layak dan refresentatif	Sekolah	1	1	1	-	-	-	-	6.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terehabnya gedung sekolah yang rusak menjadi lebih layak dan refresentatif	Sekolah	9	9	9	9	9	9	9	16.200	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 3 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Sekolah	Gedung sekolah terpelihara konstruksi bangunan dan perlengkapan penunjangnya	Sekolah	9	9	9	9	9	9	9	8.100	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 4 : Pengadaan Perlengkapan Gedung Sekolah	Sekolah memiliki perlengkapan yang memenuhi standar kelayakan minimum termasuk sarana air bersih dan sanitary	Sekolah	9	9	9	9	9	9	9	27.000	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>														
<b>INDIKATOR : Persentase guru SD dan SMP, yang bersertifikat pendidik</b>														
<b>PROGRAM 1 : Pengembangan Sistem Perencanaan</b>														
<b>PROGRAM 2 : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>														
Kegiatan 1 : Pelatihan dan Fasilitasi Kompetensi Tenaga Pendidik	Motivasi guru dalam memenuhi SNP guru SD dan SMP	orang	160	160	160	160	160	160	160	160	11.520	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 3 : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Peserta memahami proses, maksud dan tujuan adanya Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	orang	200	200	200	200	200	200	200	200	0,24	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 4 : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Tercapainya peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP	Orang	200	200	200	200	200	200	200	200	0,24	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,	
Kegiatan 5 : Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sekolah dapat menyajikan data pokok pendidikan dengan valid dan akurat. 923 SD, 153 MI	Sekolah	180	180	180	180	180	180	180	176	176	1.800	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 6 : Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bintek Integrasi Verifikasi dan Validasi/Pemuta khiran NUPTK, Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan terupdate	Sekolah	180	180	180	180	180	180	176	176	1.800	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,	



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>INDIKATOR : Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa</b>													
<b>PROGRAM 1 : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>													
Kegiatan 1 : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	1. Pelatihan kompetensi guru SD/SMP, 2. Seleksi Guru/Kepala/Pengawas SD/SMP di Kabupaten Cirebon	orang	3	3	3	3	3	3	3	3	26.136	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
Kegiatan 2 : Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Tersusunnya kurikulum di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Cirebon	orang	80	80	80	80	80	80	80	80	3.967,17	APBD, BANPROV, APBN,	Dinas Pendidikan,
<b>TUJUAN : KESETARAAN GENDER</b>													
<b>INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>													
<b>INDIKATOR : Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</b>													
<b>PROGRAM 1 : Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan</b>													
Kegiatan 1 : Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	Dokumen	1	-	1	-	1	-	1	-	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Barenlitbangda, Disnakertrans, DPPKBPPPA,
Kegiatan 2 : Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak	Dokumen	1	-	-	1	-	-	1	-	600	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Barenlitbangda, Disnakertrans, DPPKBPPPA,
Kegiatan 3 : Koordinasi lintas dinas dan lembaga layanan	Terkoordinasikannya penyelesaian masalah-masalah perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	22,5	APBD, BANPROV, APBN, Kemitraan	Setda, Barenlitbangda, Disnakertrans, DPPKBPPPA,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
<b>PROGRAM 2 : Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>												
Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak	Dokumen	1	-	1	-	1	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, DPPKBPPPA,
Kegiatan 2: Pengarusutamaan gender bidang kesehatan	Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	-	1	-	1	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Barenlitbangda, Disnakertrans, DPPKBPPPA,
Kegiatan 3: Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan	Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	-	1	-	1	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Barenlitbangda, Disnakertrans, DPPKBPPPA,
Kegiatan 4: Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	1	-	1	-	-	1	1	1.000	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, DPPKBPPPA,
Kegiatan 5: Pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Jumlah kebijakan bidang pendidikan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	-	1	-	1	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Barenlitbangda, DPPKBPPPA,
Kegiatan 6: Peningkatan	Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi tenaga		1	-	1	-	1	-	-	1.000	APBD, BANPROV,	Setda, DPRD, Barenlitbangda,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
perindugan bagi tenaga kerja perempuan	kerja perempuan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Kebijakan										APBN,	Disnakertrans, DPPKBPPA, Filantropi, Dunia Usaha
Kegiatan 7 : Peningkatan Perindugan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah kebijakan terkait perindugan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	100	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, DPRD, Barenlitbangda, Disnakertrans, DPPKBPPA,
Kegiatan 8 : Peningkatan perindugan bagi perempuan dengan masalah sosial	Jumlah kebijakan terkait perindugan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	32.5	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Barenlitbangda, Dinsos, DPPKBPPA,
<b>INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria</b>												
Kegiatan 1 : Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Gender	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas Kepala Keluarga	4.366	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	2.616	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Dinas Sosial, Dinas DPPKBPPA,
Kegiatan 2 : Penatalaksanaan Manajemen Hak Anak	Jumlah Lembaga/ Kelompok/ Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Anak yang CERIA (C = Cerdas, E = Energik, R = Responsif, I = Inovatif, A = Akuntabel) Kelompok	40	40	40	40	40	40	40	40	600	APBD, BANPROV, APBN,	DPPKBPPA,

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 3 : Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Gender	Orang	25	25	25	25	25	25	25	43,75	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, DPPKBPPPA,	
<b>INDIKATOR : Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>												
Kegiatan 1 : Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Kegiatan yang Valid	1	1	1	1	1	1	1	1.500	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA,	
<b>INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir</b>												
<b>PROGRAM 1 : Pendampingan korban kekerasan seksual</b>												
Kegiatan 1 : Penanganan hukum pelaku kekerasan seksual	Orang	40	40	40	40	40	40	40	2.400	APBD, BANPROV, APBN	Dnas Kesehatan, DPPKBPPPA, Satpol PP, Polres,	
Kegiatan 2 : Pendampingan korban kekerasan seksual	Orang	75	75	75	75	75	75	75	180	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Dnas Kesehatan, DPPKBPPPA,	
	Korban kekerasan seksual mendapatkan layanan yang berkualitas	Orang	75	75	75	75	75	75	76	180	APBD, BANPROV, APBN,	Setda, Dnas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPPKBPPPA, Polres,



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 3 : Pelatihan tenaga pendamping korban kekerasan seksual	Orang	25	25	25	25	25	25	25	25	130	APBD, BANPROV, APBN, Kemitraan	Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKBPPPA,
INDIKATOR : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif												
PROGRAM 1 : Program Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif												
Kegiatan 1 : Pelatihan kesadaran hukum	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA,
INDIKATOR : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif												
Kegiatan 2 : Pengembangan sistem dan mekanisme memudahkan perempuan korban kekerasan mengakses hak-haknya	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA,
INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun												
INDIKATOR : Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun												
INDIKATOR : Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)												
INDIKATOR : Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)												
INDIKATOR : Total Fertility Rate (TFR)												

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>												
Kegiatan 1 : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang memahami KRR	Orang	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	2.800	APBD, BANPROV, APBN	Setda, DPPKBPPA
Kegiatan 2 : Workshop Program Kependudukan dan Keluaga Berencana bagi Tokoh Remaja	Bertambahnya Tokoh Remaja yang memahami Program KKB	Orang	40	60	80	100	120	140	160	1.400	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPA,
Kegiatan 3 : Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya penjarangan kes siswa SD kls 1, pembekalan dokcil dan kader kesehatan remaja, lama sekolah sehat, dokter cilik, kader kesehatan remaja, akselerasi pelaksanaan UKS, rakontek UKS, program komunikasi jejaring prog UKS</li> <li>▪ Seluruh sekolah ( SD, SMP, SMA) melaksanakan penjarangan dan pelayanan kesehatan anak sekolah</li> </ul>	Orang	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	1.400 (100%)	2.800	APBD, BANPROV, APBN	Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPPKBPPA, Dinas PMD, Dinas Trantib, Polres, Filantropi
Kegiatan 4 : Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang memahami KRR	Orang	120	120	120	120	120	120	120	7.200.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan, DPPKBPPA



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>PROGRAM 2 : Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>													
Kegiatan 1 : Fasilitasi Pembentukan Forum Konsultasi KB Pria	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Orang	200	200	200	200	200	200	200	200	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Dinas Sosial
Kegiatan 2 : Sosialisasi/ Orientasi Peningkatan Pelindungan dan Hak- Hak Reproduksi Individu	Bertambahnya Remaja yang memahami Triad KRR(Seks Bebas Napza HIV/AIDS)dan Puskesmas	Puskesmas	57 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
<b>INDIKATOR : Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur</b>													
<b>PROGRAM 1 : Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan Female Genital Mutilation (FGM) atau Sunat Perempuan umur</b>													
Kegiatan 1 : Sosialisasi pelanggaran pelaksanaan FGM	Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan Female Genital Mutilation (FGM) atau Sunat Perempuan dengan tingkat yang membahayakan ( <i>harm</i> )	Dokumen	1	-	1	1	-	1	1	1	1.000	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPAPA
Kegiatan 3 : Penyusunan Strategi untuk menghilangkan praktek FGM. Peraturan medis yang melarang dilakukan FGM	Persentase fasilitas menyediakan pelayanan medis, psikologis, serta rujukan, bagi perempuan yang mengalami FGM	Dokumen	1	-	1	-	1	-	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPAPA
	Jumlah institusi pendidikan dan pelatihan yang menyediakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan komplikasi akibat FGM	Puskesmas	57 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 4 : Pencatatan kejadian FGM	Persentase perempuan mengalami FGM  Puskesmas	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	57 (100%)	13.824	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kesehatan
Kegiatan 5 : KIA Pencatatan kejadian FGM	Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan Female Genital Mutilation (FGM) atau Sunat Perempuan dengan tingkat yang membahayakan (harm) Dicatat ada atau tidak ada dokumen kebijakan/regulasi,	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	DPPKBPPPA
INDIKATOR : Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi												
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Bertambahnya masyarakat yang terpapar informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	Diras Pendidikan
Kegiatan 2 : Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (PEKKA)	Terciptanya perempuan mandiri	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	DPPKBPPPA
Kegiatan 3 : Seminar dan	Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN,	DPPKBPPPA



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Sosialisasi Perlindungan Perempuan	tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi									Filantropi		
<b>PROGRAM 2 : Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>												
Kegiatan 1 : Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terbentuknya kelompok perempuan dan bertambahnya anggota kelompok perempuan dalam pembangunan	Orang	100	150	175	200	225	250	250	1.100	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA
Kegiatan 2 : Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok Perempuan dalam Pembangunan	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	840	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA
Kegiatan 3 : Pembinaan Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)	Jumlah Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1.080	APBD, BANPROV, APBN	DPPKBPPPA
Kegiatan 4 : Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.080	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi	DPPKBPPPA

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024	
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
		INDIKATOR : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD										
		INDIKATOR : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial										
		PROGRAM 1 : Program pelatihan pengembangan kapasitas										
Kegiatan 1 : Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	Kegiatan	1. Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan	6	6	6	6	6	6	6	60.480	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi dan Kemitraan	DPPKBPPPA
		2. Lahir kader-kader perempuan yang berkualitas	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	60.480	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi dan Kemitraan
		INDIKATOR : Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian;										
		INDIKATOR : Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan										
		INDIKATOR : Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak control										
		PROGRAM 1 : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemertaaan Tanah										
Kegiatan 1 : Penyusunan dan Pengumpulan Data	Tersedia dokumen perencanaan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1.000	APBD, BANPROV, APBN	Barenitbangda



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Pemanfaatan Tanah											
Kegiatan 2 : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Masyarakat memiliki akses yang sama dalam penguasaan lahan dan pengurusan legalitas tanah (lahan)	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	450	APBD, BANPROV, APBN	Barentibangda, Dinas PUPR, Diskrimuntan, BPN, Dinas PMD
Kegiatan 3 : Verifikasi Penyediaan Prasarana Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan	Tersedianya data akurat tentang Penyediaan Prasarana Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	450	APBD, BANPROV, APBN	Barentibangda, Dinas PUPR, Diskrimuntan, BPN, Dinas PMD
Kegiatan 4 : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kepala Keluarga	50	50	50	50	50	49	49	8.970	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Sosial, DPKPP,
<b>INDIKATOR : Proporsi individu yang memiliki telepon genggam</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</b>												
Kegiatan 1 : Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan	Penyusunan kajian standar Operasional prosedur (SOP) Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan terdapatnya pengguna	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Kominfo

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
komunikasi	jaringan komunikasi											
<b>INDIKATOR : Upah rata-rata per jam pekerja</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>												
Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1.800	APBD, BANPROV, APBN	Disnakertrans
Kegiatan 2 : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan ketenagakerjaan Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1.800	APBD, BANPROV, APBN	Disnakertrans
Kegiatan 3 : Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	750	APBD, BANPROV, APBN	Disnakertrans
<b>INDIKATOR : Tingkat pengangguran terbuka</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja</b>												
Kegiatan 1 : Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan	Jumlah Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	3.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, Dinas Koperasi



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kesempatan Kerja													
	Jumlah Kerjasama dalam Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Penyebaran Informasi	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	600	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, Dinas Koperasi UMKM
Kegiatan 2 : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya	Orang										APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru	Orang	52.043	62.452	72.860	83.269	93.677	104.086	104.086	2.400	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans	
	Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan melalui kegiatan penciptaan wirausaha muda	Orang	80	80	80	80	80	80	80	80	4.800	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
<b>INDIKATOR : Persentase setengah pengangguran</b>													
<b>INDIKATOR : Persentase Tenaga Kerja Formal</b>													

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
INDIKATOR : Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian												
PROGRAM 1 : Program Cirebon Bebas Pengangguran												
Kegiatan 1 : Kampung Produktif	Munculnya wirausaha baru	Lokasi (1 lokasi 4 org)	20	40	60	80	100	120 (kumulatif)	120 (kumulatif)	4.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
PROGRAM 2 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja												
Kegiatan 1 : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja</li> <li>▪ Jumlah Lowongan Kerja</li> </ul>	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	2.700	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
Kegiatan 2 : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	1.800	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
Kegiatan 3 : Peningkatan Kelenyangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	2.700	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 4 : Penyebarluasan Informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Penyebarluasan informasi prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja luar negeri.	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
Kegiatan 5 : Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
Kegiatan 6 : Job Fair	- Terlaksananya Pameran Bursa kerja dengan peserta - Jumlah lowongan kerja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
Kegiatan 7 : Pembinaan Pencari Kerja	Terbinanya Pencari Kerja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
Kegiatan 8 : Pemagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Pemagangan dalam negeri di sektor jasa pariwisata	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
<b>PROGRAM 3 : Pembinaan Lingkungan Sosial</b>												
Kegiatan 1 : Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Tertlatihnya dan terdidiknya masyarakat dilingkungan sekitar industri/tembakau	Orang	100	100	100	100	100	100	100	600	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
<b>INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Tertelaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan : a. Peraturan Perusahaan; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja); d. LKS Bipartit	Orang	200	200	200	200	200	200	200	1.500	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
Kegiatan 2 : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan	Tertelaksananya Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Pabrik	60	60	60	60	60	60	60	1.200	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN GIREBON</b>												
dan Kesehatan Kerja												
Kegiatan 3 : Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui: - Bimtek - Seminar BPJS	Orang	300	300	300	300	300	300	300	750	APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi	Disnakertrans
Kegiatan 4 : Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya Peningkatan Hukum terhadap norma kerja	Pabrik	65	65	65	65	65	65	65	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Disnakertran, Dinas Perdagangan Perindustrian
<b>TUJUAN : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</b>												
<b>INDIKATOR : Proporsi Limbah Cair Yang Diolah Secara Aman</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>												
Kegiatan 1 : Identifikasi : sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem pengolahan,banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan beracun dan berbahaya yang terdapat dalam pabrik	Tersusunnya hasil Identifikasi : sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem pengolahan,banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan beracun dan berbahaya yang terdapat dalam pabrik	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Pembuatan model IPAL	Tersedia model IPAL untuk berbagai jenis industri	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	300	APBD, BANPROV,	Dinas Lingkungan Hidup

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Industri									APBN			
Kegiatan 3 : Pembuatan stimulan IPAL Industri	Terbangunnya IPAL untuk berbagai jenis industri : Furniture, Batu Alam, Industri makanan, dan batik	Unit	2	4	6	8	10	12 (kumulatif)	12 (kumulatif)	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
	INDIKATOR : Jumlah Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan Dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)											
	PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
Kegiatan 1 : Pembuatan stimulan IPAL lumpur tinja	Terbangunnya IPAL untuk pengolahan lumpur tinja	Unit	1	1	1	1	1	1	1	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
	INDIKATOR : Proporsi Badan Air Dengan Kualitas Air Ambien Yang Baik											
	INDIKATOR : Kualitas Air Danau											
	INDIKATOR : Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku											
	PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan</li> <li>▪ Birtak peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan</li> </ul>	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	6.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup





Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 4 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya pokmas, lembaga bank sampah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah	pokmas	20	25	30	35	40	45	45	750	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR : Perubahan Efisiensi Penggunaan Air Dari Waktu Ke Waktu												
INDIKATOR : Insentif Penghematan Air Pertanian/Perkebunan Dan Industri												
INDIKATOR : Tingkat Water Stress: Proporsi Pengambilan (Withdrawal) Air Tawar Terhadap Ketersediannya												
PROGRAM 1 : Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam												
Kegiatan 1 : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terjaganya Fungsi Kawasan Resapan Sumber-sumber Mata Air	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Laporan Inventarisasi Keaneekaragaman hayati	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR : Pengendalian Dan Penegakan Hukum Bagi Penggunaan Air Tanah												
PROGRAM 1 : Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan												



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 1 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat	Termonitornya dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR : Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu												
INDIKATOR : Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Yang Diinternalisasi Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)												
PROGRAM 1 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya												
Kegiatan 1 : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	400	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 2 : Perencanaan Pembangunan Reservoir	Tersedianya dokumen perencanaan detail Reservoir	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 3 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Meningkatnya pengelola irigasi pengetahuan petani tentang pengelolaan jaringan irigasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	2.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 4 : Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	500	APBD, BANPROV,	Dinas PUPR, Dislakan, Dinas

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara dan Pengaman Kawasan Pantai									APBN	Lingkungan Hidup	
Kegiatan 5 : Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara Sungai dan Pengaman Kawasan Pantai	Prasarana Jaringan Irigasi yang dipelihara											
	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	750	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 6 : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air	Telaksananya operasi dan pemeliharaan Sumber Air											
	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
<b>INDIKATOR : Jumlah Stasiun Hidrologi Dan Klimatologi Yang Dilakukan Updating Dan Revitalisasi</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air</b>												
Kegiatan 1 : Penyusunan Sistem Informasi/Database	Tersedianya Data Kondisi Sungai dan Jaringan Irigasi											
	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR





Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>												
Kegiatan 1 : Perencanaan Pengelolaan DAS	Tersusunnya dokumen perencanaan detail pengelolaan DAS	DAS	3	3	3	3	3	3	3	7.500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 2 : Penataan RTH	Terbangunnya RTH Publik	Ha	5	15	20	25	30	35	35	13.000	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 3 : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terciptanya kawasan RTH yang asri	Ha	5	15	20	25	30	35	35	1.800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 4 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 5 : Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Partisipatif Pengelolaan DAS Terpadu	Tersusunnya dokumen Kelembagaan dan Kemitraan Partisipatif Pengelolaan DAS Terpadu	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	800	APBD, BANPROV, APBN	Dinas PUPR
Kegiatan 6 : Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan	Tersajinya laporan kemajuan kegiatan pengelolaan DAS di Kabupaten Cirebon	DAS	3	3	3	3	3	3	3	4.500	APBD, BANPROV, APBN	, Dinas PUPR



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
<b>DAS</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengendalian Banjir</b>												
Kegiatan 1 : Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai	Saluran/Pantai Aman dari Daya Rusak Air Laut/Abrasi	Paket	3	3	3	3	3	3	3	4.500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup, Dislakan
Kegiatan 2 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai	Saluran/Pantai Aman Dari Daya Rusak Air Laut/Abrasi yang direhabilitasi	Paket	3	3	3	3	3	3	3	4.500	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup, Dislakan
<b>INDIKATOR : Proporsi Unit Pemerintah Lokal Yang Menerbitkan Dan Melaksanakan Kebijakan Dan Prosedur Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Dan Sanitasi</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mampu secara mandiri mengembangkan praktek-prakte k ramah lingkungan dan peningkatan akses informasi lingkungan bagi masyarakat	kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Peningkatan Kualitas	Meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mampu	kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD, BANPROV,	Dinas Lingkungan Hidup

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	secara mandiri mengembangkan praktek-praktek ramah lingkungan dan peningkatan akses informasi lingkungan bagi masyarakat									APPBN		
TUJUAN : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI												
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan PDB per Kapita												
INDIKATOR : PDB per Kapita												
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun												
PROGRAM 1 : Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor												
Kegiatan 1 : Peningkatan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Pameran Perindustrian dan Perdagangan, Temu Bisnis Pelaku Usaha Dengan Atase Perdagangan Eropa serta Pembuatan Katalog Produk Ekspor	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1.200	APPD, BANPROV, APPBN	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker
Kegiatan 2 : Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Pembinaan prosedur ekspor dan impor bagi para pengusaha kecil dan menengah	Pengusaha	100	100	100	100	100	100	100	300	APPD, BANPROV, APPBN	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker, Dinas Koperasi UMKM
Kegiatan 3 : Kegiatan 3 :	Pemantauan Harga Barang Kepokmas dan Barang	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APPD, BANPROV,	Dinas Perdagangan



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	Penting/ Strategis serta survey ketersediaan barang kepokmas									APBN	Perindustrian, Disnaker, Dinas Koperasi UMKM	
Kegiatan 4 : Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Pemungutan retribusi di 9 Pasar Pemda								9	2.100	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker, Dinas Koperasi UMKM
INDIKATOR : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin												
PROGRAM 1 : Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan												
Kegiatan 1 : Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	Pembangunan pasar/pemeliharaan pasar, pengurusan drainase, pembelian tabung, pengisian tabung pemadam kebakaran, pembangunan kios dan los untuk pedagang kaki lima dan asongan	Pasar	9	9	9	9	9	9	9	822	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan manajemen pengelolaan pasar, Bimbingan Teknis penyelenggaraan pasar, Operasi terpadu keamanan dan ketertiban pasar, Bimbingan Teknis penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Bimbingan Teknis</li> <li>▪ Pedagang Pasar Desa, Pelatihan Petugas</li> </ul>	Pasar	9	9	9	9	9	9	9	540	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024	
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Keamanan dan Petugas Retribusi Pasar												
<b>INDIKATOR : Persentase Akses Layanan Keuangan Formal UMKM</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan	Tersampainya a peningkatan bidang industri dan perdagangan serta kumpulan untuk substansi kebijakan di bidang industri dan perdagangan	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 2 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM	Tertaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan OPD bidang koperasi dan UMKM	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 3 : Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi pengembangan kawasan bagi pelaku UMKM (outlet) melalui observasi lapangan (OL)	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 4 : Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	- Jumlah peserta pelatihan  - Laporan hasil pelatihan	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 5 : Fasilitasi Pengembangan Usaha	- Jumlah peserta pelatihan  - Laporan hasil pelatihan	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
Kecil Menengah													
INDIKATOR : Bantuan Untuk Komitmen Perdagangan Dan Pencairan Pendanaan													
PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian													
Kegiatan 1 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan	Tersampainya a peningkatan bidang industri dan perdagangan serta kumpulan untuk substansi kebijakan di bidang industri dan perdagangan	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 2 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal	Tertaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan OPD bidang penanaman modal di kabupaten cirebon	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
Kegiatan 3 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan	Tersampainya a peningkatan dibidangpendapatan dan kumpulan masukan untuk substansi kebijakan di bidang perdagang	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	450	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian
INDIKATOR : Total Pengeluaran Pemerintah Dalam Program Perlindungan Sosial Dan Ketenagakerjaan Dalam Proporsi Terhadap Anggaran PDB													
INDIKATOR : Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan													
INDIKATOR : Persentase Dan Jumlah Anak Usia 5-17 Tahun, Yang Bekerja, Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Dibedakan Berdasarkan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)													

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Perindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>													
Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tertaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
Kegiatan 2 : Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Tertaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan : a. Peraturan Perusahaan; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja); d. LKS Bipartit	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
Kegiatan 3 : Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Tertaksananya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui : a. Bimtek b. Seminar BPJS	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, BPJS
Kegiatan 4 : Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	Tertaksananya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans
Kegiatan 5 : Pekerja perempuan mendapatkan haknya yang	Pekerja perempuan mendapatkan haknya yang	Orang	100	120	175	200	220	250	250	400	400	APBD, BANPROV,	Setda, Dinas Perdagangan



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	terampas dari adanya perselisihan hubungan industrial											APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Perindustrian, Disnakertrans,
Kegiatan 6 : peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja	menurutnya pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan	Orang	100	120	175	200	220	250	250	400	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans	
Kegiatan 7 : sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	telaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Orang	100	120	175	200	220	250	250	600	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans	
Kegiatan 8 : peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3	telaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3	Orang	100	120	175	200	220	250	250	500	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans	
Kegiatan 9 : pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja	telaksananya pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui: bintek, seminar BPJS	Orang	100	120	175	200	220	250	250	600	APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha	Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, BPJS	
<b>INDIKATOR : Jumlah Wisatawan Nusantara</b>													

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>													
INDIKATOR : Jumlah Wisatawan Mancanegara													
PROGRAM 1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara													
PROGRAM 2 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara													
Kegiatan 1 : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah group seni yang direvitalisasi, direkonstruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan	Grup	25	25	25	25	25	25	25	25	4.200	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparora
Kegiatan 2 : Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya	BCB	25	25	25	25	25	25	25	25	600	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
Kegiatan 3 : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Apresiasi dan Pengembangan Karya Seni dan Kerajinan Tangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
Kegiatan 4 : Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terbangunnya kawasan seni dan budaya di Kabupaten Cirebon	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	-	-	12.000	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 5 : Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya	BCB	25	25	25	25	25	25	25	600	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
Kegiatan 6 : Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata	Jumlah kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN	Kegiatan	10	10	10	10	10	10	10	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
Kegiatan 7 : Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah situs yang dibangun	Situs	7	7	7	7	7	7	7	3.00	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
<b>INDIKATOR : Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan</b>												
Kegiatan 1 : Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terbangunnya sarpras pariwisata	ODTW	2	2	2	2	2	2	2	900	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
Kegiatan 2 : Pelaksanaan koordinasi pembangunan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Orang	160	160	160	160	160	160	160	750	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
kemitraan pariwisata												
Kegiatan 3 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan MICE yang dilaksanakan  Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1.200	APBD, BANPROV, APBN	Disbudparpora
<b>INDIKATOR : Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB</b>												
<b>INDIKATOR : Jumlah Devisa Sektor Pariwisata</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>												
Kegiatan 1 : Kajian Pemetaan Data Objek Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah  Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan 2 : Pemutakhiran Data Objek dan Subyek PBB	Data Objek dan Subyek PBB yang mutakhir  Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan 3 : Penyerahan SPTPD, SKPD dan Pengalihan Pajak	Terwujudnya basis data objek dan subyek PBB yang mutakhir  Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan 4 : Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah  Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah



Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON</b>												
Kegiatan 5 : Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Data Jenis Pajak Daerah Yang di Verifikasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan 6 : Penyisiran dan Penjarangan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan 7 : Pembinaan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah Bagi Petugas UPT Pajak dan Wajib Pajak	Meningkatnya Kemampuan Petugas UPT Pajak dan Wajib Pajak Dalam Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan 8 : Pelatihan Teknis Perhitungan Pajak Daerah	Tercapainya Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak dan Pengetahuan Petugas Pemungut Pajak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	600	APBD, BANPPROV, APBN	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Pj. BUPATI CIREBON,**

TTD

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4

SERI 5

Lampiran III Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DARI PROGRAM/KEGIATAN NON PEMERINTAH**

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN</b>													
<b>INDIKATOR: Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>													
<b>PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Fakir Miskin</b>													
Kegiatan 1: Fasilitas pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin yang mempunyai Keterampilan	Kepala Keluarga	120	120	120	120	120	120	120	120	360.000.000	Ormas Filantropi dan Kemitraan	Aisyiyah Kabupaten Cirebon
Kegiatan 2: Pembinaan pengelolaan keuangan keluarga bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin mempunyai kemampuan mengelola keuangan keluarga	Kepala Keluarga	300	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, ADD, Filantropi dan Kemitraan	Aisyiyah Kabupaten Cirebon
Kegiatan 3: Pendampingan usaha bagi keluarga miskin	Keluarga miskin meningkat kualitas hidupnya	Kepala Keluarga	120	120	120	120	120	120	120	120	72.000.000	Bansos, Filantropi dan Kemitraan	Aisyiyah Kabupaten Cirebon
Kegiatan 4: Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial Mempunyai Keterampilan Dan Memiliki KUBE	Orang	80	80	80	80	80	80	80	80	24	kemitraan	Forum Warga Buruh Migran Indonesia (lokasi: pangenan, gebang, babakan, pabedian)
Kegiatan 5: Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dari Keluarga Miskin	Perempuan memiliki keterampilan dalam menghasilkan sebuah produk	Kelompok	5	5	5	5	5	5	5	5	300.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 6: Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro	Orang	Orang miskin mendapat Pembiayaan Usaha Perorangan	200	200	250	250	300	300	250	700.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
		penduduk miskin mendapat Pembiayaan Usaha Kelompok	12	12	12	12	12	12	12	3.600.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 7: Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana	Orang	10	10	10	10	10	10	10	240.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon	
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>												
Kegiatan 1: Peningkatan dan pemberian bantuan terhadap korban Bencana	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1.200.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon	
Kegiatan 2 : Kegiatan Ketahanan Pangan	Orang	500	500	500	500	500	500	500	300.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon	
Kegiatan 3: Pemberian Santunan Yatim Dhuafa Jompo	Orang	500	500	500	500	500	500	500	300.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon	
<b>INDIKATOR : Persentase Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar</b>												
<b>Program 1 : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>												
Kegiatan 1 Pelatihan Disabilitas	Orang	20	20	20	20	20	20	20	300.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon	
Kegiatan 2: Pemberian Bantuan Penyandang Cacat	Orang	10	10	10	10	10	10	10	180.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>INDIKATOR : Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS)</b>													
<b>PROGRAM 1 : Program Advokasi Peningkatan Layanan Kesehatan</b>													
Kegiatan 1: Pendataan dan advokasi JKN PBI dan KIS bagi warga miskin yang memenuhi syarat penerima tapi tidak mendapatkan haknya	Warga miskin yang memenuhi persyaratan mendapatkan haknya atas layanan dasar	Orang	120	120	120	120	120	120	120	120	3.000.000	Bansos, Filantropi dan Kemitraan	Aisyiah Kabupaten Cirebon
Kegiatan 2: Pembinaan dan pendampingan kepada warga miskin penerima JKN PBI dan KIS	Peningkatan kualitas hidup warga miskin penerima JKN PBI dan Kartu KIS	Orang	120	120	120	120	120	120	120	120	3.000.000	Bansos, Filantropi dan Kemitraan	Aisyiah Kabupaten Cirebon
Kegiatan 3 Pemberian bantuan biaya rawat jalan bagi pasien miskin	Pasien miskin mendapat pelayanan kesehatan dengan dibantu Biaya rawat jalannya	Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	120.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 4: Bantuan Pengobatan Gratis dan Pendirian Rumah Sehat	Pemberian Pelayanan kesehatan/ Pengobatan secara gratis bagi fakir miskin	Orang	500	500	500	500	500	500	500	500	15.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 5: Khitanan Massal	Anak fakir miskin mendapat bantuan khitanan massal	Orang	200	200	200	200	200	200	200	200	600.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 6: Pemberian bantuan Ambulance Gratis	Pemberian Pelayanan kesehatan secara gratis bagi fakir miskin	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	200.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024	
<b>INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b> <b>INDIKATOR : Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pembiayaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>												
Kegiatan 1: Bantuan Jamban Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan sanitasi layak (jamban) bagi fakir miskin	Unit	50	50	50	50	50	50	50	45.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 2: Operasional dan Sosialisasi Rumah Sehat	Adanya infrastruktur permukiman dan Pemberian Pelayanan kesehatan secara gratis bagi fakir miskin	Paket	-	-	1	1	1	1	1	960.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
<b>INDIKATOR : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Hunian yang layak dan terjangkau</b>												
<b>PROGRAM 1 : Program Pembiayaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>												
Kegiatan 1: Rehabilitasi RUTILAHU	Fakir miskin memiliki Rumah Layak Huni	Rumah	200	200	200	200	200	200	200	18.000.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
<b>INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat</b>												
<b>Program Pendidikan Menengah Pertama</b>												
Kegiatan 1: Stimulan Biaya pendidikan Siswa	Anak-anak dari fakir miskin dapat terus melanjutkan sekolah tingkat menengah	Orang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.600.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 2 : Pembangunan RKB dan Asrama SMP BAZNAS	Anak-anak dari fakir miskin mendapat layanan pendidikan hingga sekolah tingkat menengah	Unit	-	-	1					4.200.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Kegiatan 3: Operasional SMP BAZNAS	Anak-anak dari fakir miskin mendapat layanan pendidikan hingga sekolah tingkat menengah	Kelas	-	-	-	2	4	6	4	4.320.000.000	Dana ZIS	BAZNAS Kabupaten Cirebon

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>INDIKATOR: Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.</b>												
<b>PROGRAM 1: Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi Kesehatan bagi Ibu Hamil	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang pelayanan antenatal ke empat (K4)	Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, ADD, Filantropi Dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon
Kegiatan 2 : Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, ADD, Filantropi dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon
<b>INDIKATOR: Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>												
<b>PROGRAM 1: Program Sosialisasi dan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi pada Pasangan Usia Subur yang memiliki Bayi dan balita	Peningkatan dan pemahaman Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan balita tentang imunisasi dasar lengkap	Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, Filantropi Dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon
Kegiatan 2 : Pendampingan Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan balita	Peningkatan jumlah pelayanan imunisasi pada bayi/dananak di bawah dua tahun	Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, ADD, Filantropi dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon
<b>INDIKATOR: Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</b>												
<b>PROGRAM 1: Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan pengetahuan PUS tentang berbagai macam metode KB dan dampaknya	Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, ADD, Filantropi Dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 2 : Pendampingan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan jumlah kepesertaan KB  Orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	Bansos, Filantropi dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon	
<b>TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN</b>												
<b>INDIKATOR: Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita</b>												
<b>INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta</b>												
<b>INDIKATOR : Prevalensi malnutrisi atau wasting (berat badan atau tinggi badan) pada anak usia kurang dari 5 tahun</b>												
<b>INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil</b>												
<b>INDIKATOR : Persentasi bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif</b>												
<b>PROGRAM 1: Pendirian dan pengelolaan Rumah Gizi Balat Sakinah "Aisyiyah di desa</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi Gizi bagi remaja putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Juga bagi ayah dan nenek untuk dukungan nyata.	Peningkatan pengetahuan bagi remaja putri, ibu hamil dan keluarga, ibu dengan balita dan keluarga, ibu dengan anak stunting, anak gizi buruk, anak kurang gizi dan keluarga tentang gizi dan keutamaannya	Orang	300	300	300	300	300	300	18.000.000	ADD, Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon	
Kegiatan 2 : Konseling Gizi dan Koseling Menyusui bagi masyarakat	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif	orang	300	300	300	300	300	300	300	18.000.000	ADD, Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon
Kegiatan 3 : Pendampingan pengolahan makanan bergizi	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan	orang	300	300	300	300	300	300	3000	18.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 4 : Pemberian makanan tambahan secara berkala bagi bayi terindikasi gizi buruk dan kurang gizi	jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif											
Kegiatan 5: Pengelolaan kebun gizi masyarakat	orang	120	120	120	120	120	120	120	14.400.000	Filantropi (Infak dan Sodalqoh), Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah Cirebon	
Kegiatan 6 : Pemeliharaan Sanitasi	orang	120	120	120	120	120	120	120	6.000.000	Filantropi (Infak dan Sodalqoh), Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah Cirebon	
<b>TUJUAN 3 : KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN</b>												
<b>INDIKATOR:Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih</b>												
<b>INDIKATOR:Proporsi perempaan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya terakhinya di fasilitas kesehatan</b>												
<b>INDIKATOR:Angka Kematian Ibu (AKI)</b>												
<b>INDIKATOR:Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup</b>												
<b>INDIKATOR:Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup</b>												
<b>INDIKATOR:Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</b>												
<b>PROGRAM 1: Sosialisasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pemenuhan gizi Keluarga</b>												
Kegiatan 1: Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan gizi bagi remaja putri dan ibu hamil	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja putri (yang akan mengalami kehamilan) dan ibu hamil tentang kesehatan reproduksi dan kecukupan gizi bagi ibu hamil	Orang	120	120	120	120	120	120	120	6.000.000	Filantropi (Infak dan Sodalqoh), Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah Cirebon



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 2: Pendampingan layanan Kesehatan Reproduksi dan pemenuhan gizi keluarga bagi ibu hamil	Ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan sebelum, saat dan sesudah melahirkan dengan baik	Orang	300	300	300	300	300	300	300	6.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon
<b>INDIKATOR:Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis</b>												
<b>PROGRAM 1:Programpenanggulangan penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara melalui Iva test dan sadarnis</b>												
Kegiatan 1: Sosialisasi kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini Iva test dan sadarnis pada PUS	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PUS tentang penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini IVA test dan sadarnis	orang	600	600	600	600	600	600	600	18.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon
Kegiatan 2 : Pendampingan dan pelayanan pemeriksaan deteksi dini Iva test dan sadarnis bagi PUS	Jumlah PUS yang sudah melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA test dan sadarnis	orang	200	200	200	200	200	200	200	12.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon
<b>INDIKATOR:Prevalensi penyalahgunaan narkoba</b>												
<b>PROGRAM 1: Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>												
Kegiatan 1 : Sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP dan SMA dan masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	6.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon
<b>TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>												

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan								Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>INDIKATOR: Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin</b> <b>INDIKATOR: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b> <b>PROGRAM 1: Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>													
Kegiatan 1: Pembangunan sarana bermain	Tersedianya alat permainan edukatif untuk PAUD	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	12.000.000	Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan	'Aisyiyah Cirebon Dikdasmen PDA
Kegiatan 2: Penyelenggaraanpendidik ananakusidini	Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan TK ABA	PAUD dan TK ABA	15	15	15	15	15	15	15	15	36.000.000	Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan	'Aisyiyah Cirebon, Dikdasmen PDA
<b>TUJUAN : KESETARAAN GENDER</b>													
<b>INDIKATOR:Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>													
<b>PROGRAM 1: Program Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>													
Kegiatan 1: Sosialisasi hak-hak perlindungan dari tindak kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi	Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	6.000.000	Filantropi dan Kemitraan	Pusat Studi Wanita, 'Aisyiyah Cirebon
Kegiatan 2 : Pelatihan Kesadaran Hukum	Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi	orang	25	25	25	25	25	25	25	25	255.000	Kemitraan	WCC Mawar Balqis
Kegiatan 3 Pengembangan system dan mekanisme memudahkan perempuan korban kekerasan mengakses hak-haknya	Peserta (masyarakat terutama kaum perempuan) memahami dan memiliki akses informasi melalui sistem informasi tentang hak- hak perlindungan dari tindakan kekerasan	orang	25	25	25	25	25	25	25	25	45.000	Kemitraan	WCC Mawar Balqis



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	Peserta (masyarakat terutama kaum perempuan) memahami mekanisme pengaduan dan memiliki akses advokasi jika mengalami tindakan kekerasan	orang	25	25	25	25	25	25	45.000	Kemitraan	WCC Mawar Balqis	
Kegiatan 4 Pendampingan korban kekerasan seksual	Korban kekerasan seksual mendapatkan layanan yang berkualitas	orang	75	75	75	75	75	75	180.000	kemitraan	WCC Mawar Balqis	
Kegiatan 5 Pelatihan Tenaga Pendamping korban kekerasan seksual	Jumlah petugas yang pernah dilatih pendampingan dan pemulihan mental korban pelecehan atau kekerasan seksual	orang	25	25	25	25	25	25	130.000	Kemitraan	WCC Mawar Balqis	
<b>INDIKATOR: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</b>												
<b>INDIKATOR: Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</b>												
<b>PROGRAM 1: Program pelatihan pengembangan kapasitas</b>												
Kegiatan 1: Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	1. Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	12.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Pusat, 'Aisyiyah Cirebon
	2. Lahir kader-kader perempuan yang berkualitas	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	12.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), Kemitraan	Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Pusat, 'Aisyiyah Cirebon
	3. Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan	orang	20	20	20	20	20	20	255.000	Kemitraan	WCC Mawar Balqis	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR: Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun														
INDIKATOR: Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun														
INDIKATOR: Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)														
INDIKATOR: Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)														
INDIKATOR: Total Fertility Rate (TFR)														
<b>PROGRAM 1: Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>														
Kegiatan 1: Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang memahami KRR	Orang	120	120	120	120	120	120	120	120	120	7.200.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), Kemitraan	Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah Cirebon
<b>INDIKATOR : Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi</b>														
<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>														
Kegiatan 1: Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.000.000	Filantropi (Infak dan Sodagoh), dan Kemitraan	Pusat Studi Wanita, Aisyiyah Wilayah, Aisyiyah Cirebon
Kegiatan 2 : Pembinaan organisasi perempuan	Terbentuknya kelompok perempuan dan bertambahnya anggota kelompok perempuan dalam pembangunan	orang	100	150	175	200	220	250				600	kemitraan	TURC
Kegiatan 3 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan	kelompok	8	8	8	8	8	8	8	8		103.500	kemitraan	WCC Mawar Balqis
	Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan	kelompok	8	8	8	8	8	8	8	8		103.500	kemitraan	WCC Mawar Balqis



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 4 Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan sosialisasi  Orang	200	200	200	200	200	200	200	45.000	kemitraan	WCC Mawar Balqis	
<b>INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang Responsif Gender mendukung pemberdayaan perempuan</b>												
<b>Program 1: Perlindungan Anak dan pemberdayaan Perempuan</b>												
Kegiatan 1 Koordinasi lintas dinas dan Lembaga Layanan	Terkordinasikannya penyelesaian masalah perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan	Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	22.500	kemitraan	WCC Mawar Balqis
<b>Program 2 : Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>												
Kegiatan 1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi dan diharmonisasikan	Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	85.000	kemitraan	WCC Mawar Balqis
Kegiatan 2 Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi dan diharmonisasikan	Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	32.500	kemitraan	WCC Mawar Balqis
<b>Program 3 Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria</b>												
Kegiatan Pembinaan ketahanan Keluarga Berbasis Gender	Tenwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	orang	25	25	25	25	25	25	25	43.750	kemitraan	WCC Mawar Balqis
<b>Program 4 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>												
Kegiatan 1 Seminar dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan	Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dan dihensi	orang	25	25	25	25	25	25	25	45.000	kemitraan	WCC Mawar Balqis

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan 2 Diskusi Reguler Komunitas Dampungan	Meningkatnya peran masyarakat (komunitas) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Frekuensi kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	103.500	kemitraan	WCC Mawar Balqis
Kegiatan 3 Kampanya penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (International Woman day & 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan)	Bertambahnya pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	300	300	300	300	300	300	300	85.000	kemitraan	WCC Mawar Balqis

### TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

#### INDIKATOR : Upah rata-rata per jam

Program 1 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
Kegiatan 1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pekerja perempuan mendapatkan haknya yang terampas dari adanya perselisihan hubungan industrial	orang	100	120	175	200	220	250	400	kemitraan	TURC
			orang	100	120	175	200	220			
<b>INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3</b>											
Program Perlindungan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan											
Kegiatan 1 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	orang	100	120	175	200	220	250	600	kemitraan	TURC
			orang	100	120	175	200	220			



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan							Indikator Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	INSTANSI PELAKSANA
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Kegiatan 2 Peningkatan Pengawasan perlindungan dan Penegakan hukum terhadap K3	orang	100	120	175	200	220	250		500	kemitraan	TURC
Kegiatan 3 Pembinaan Persyaratan kerja dan Kesejahteraan tenaga kerja	orang	100	120	175	200	220	250		600	kemitraan	TURC, BPJS

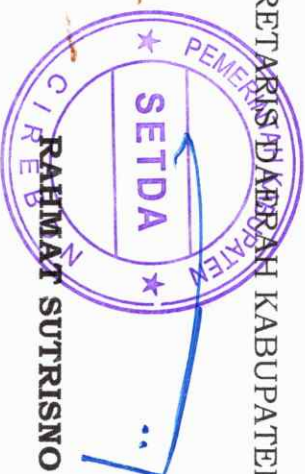
**Pj. BUPATI CIREBON,**

TTD

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E